

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
648992

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Berakhir Tanggal
30 Juni 2024



2024

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN 648992
(DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI/
013.06)**

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2024

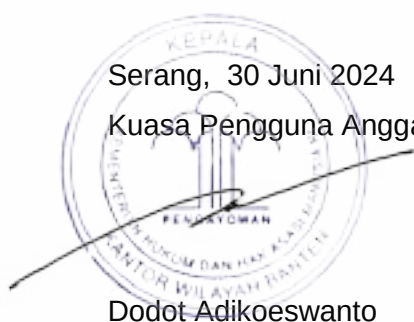
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (648992) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (648992). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)

Jl. KH Syam'un No. 44 D Serang, Banten

Telp (0254) 223104, 217029 Fax (0254) 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.06) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (648992) 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.233.614.800,- atau mencapai 50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.447.456.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp80.000.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp80.000.000,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp80.000.000,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah

sebesar Rp 1.233.345.459 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.233.345.459). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.233.345.459).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.233.345.459) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.233.345.459,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24		% thd Angg	30-Jun-23
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	2.447.456.000	1.233.614.800	50	1.059.022.015
Belanja Modal	B.5	-	-		
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		2.447.456.000	1.233.614.800	50	1.059.022.015

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) NERACA PER 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	80.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		80.000.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		80.000.000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	80.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		80.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		80.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		80.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (648992)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		-
JUMLAH PENDAPATAN			-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		-
Beban Persediaan	D.3		-
Beban Barang dan Jasa	D.4	727.440.505	588.367.275
Beban Pemeliharaan	D.5		-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	506.174.295	470.654.740
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7		-
Beban Bantuan Sosial	D.8		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9		-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(269.341)	-
JUMLAH BEBAN		1.233.345.459	1.059.022.015
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.233.345.459)	(1.059.022.015)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya			-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.233.345.459)	(1.059.022.015)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.233.345.459)	(1.059.022.015)

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-21	30-Jun-20
EKUITAS AWAL	E.1	53.598.934	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.233.345.459)	(1.059.022.015)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(1.179.746.525)	(1.059.022.015)
EKUITAS AKHIR	E.5	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan

- bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
 5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian
3. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat memenuhi standar serta akuntabel
4. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) .

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

• **Pendapatan- LRA**

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

• **Pendapatan- LO**

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

• **Belanja**

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

• **Beban**

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

• **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

-) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
-) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah

berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

-) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

-) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
-) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
-) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

-) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

o **Kewajiban**

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) melaksanakan kegiatan Berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA - 013.06.2.648992/2023 tanggal 23 November 2023.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	2.447.456.000	123.614.800
Belanja Modal	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	2.447.456.000	123.614.800

*Realisasi
Pendapatan
Rp0,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30-Jun-20		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	Realisasi Per 30 Juni 2018	Realisasi Per 30 Juni 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara Rp1.233.614.800

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 1.233.614.800 atau 30% dari anggaran belanja sebesar Rp 1.233.614.800. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024

Uraian	Per 30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.447.456.000	1.233.614.800	50
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	2.447.456.000	1.233.614.800	50
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.447.456.000	1.233.614.800	50,40

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi Per 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.233.614.800	1.059.022.015	16,49
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.233.614.800	1.059.022.015	16,49

Terdapat kenaikan belanja barang dibanding Tahun 2023 dikarenakan anggaran belanja lebih besar pada tahun 2024

Belanja

B.3 Belanja Pegawai

Pegawai Rp0

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 30 Juni 2024 mengalami tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2024 dan 2023.

*Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2024
dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	NIHIL		
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Belanja Vakasi			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp1.233.614.800

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.233.614.800 dan Rp1.059.022.015 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 61% dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023

*Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2024
dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan	165.737.815	29.079.500	469,95
Belanja Honor Output Kegiatan	16.200.000	41.100.000	100,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	337.098.690	14.410.000	2.239,34
Belanja Opr- Penanganan Pandemi		30.000.000	
Belanja Sewa	107.804.000		#DIV/0!
Belanja Jasa Profesi	1.800.000		#DIV/0!
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi		7.500.000	
Belanja Jasa Lainnya	98.800.000	100.660.000	(1,85)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	342.794.295		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.030.000	825.000	267,27
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.600.000		#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.750.000	12.450.000	
Belanja Pemeliharaan Jaringan			100,00
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja			
Jumlah Belanja	1.233.614.800	236.024.500	422,66

*Belanja Modal
Rp0*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh tidak adanya anggaran Belanja Modal di Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 30 Juni 2023 Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2024 atau TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-24	30-Jun-23	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah			
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah			
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0, tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
alat kantor dan alat rumah tangga	0		0,00
alat studio,komunikasi dan pemancar	0		0,00
komputer	0		0,00
alat keselamatan kerja	0		0,00
			0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. tidak ada kenaikan atau penurunan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2023 dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2024 dan 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Belanja modal gedung dan bang	0		
Jumlah Belanja Kotor	0		
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan baik di TA 2024 ataupun di TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024
dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (Turun) %
Belanja Modal Jaringan			
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja modal lainnya pada TA 2024 dan TA 2023

Belanja

Bantuan Sosial

Rp.0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat

untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian	0	-	
Jumlah Belanja	0	0	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp80.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp80.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024
dan 31 Desember 2023*

Keterangan	30-Jun-20	31-Dec-19
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024
dan 30 Juni 2023*

Keterangan	30-Jun-24	30-Jun-23
Uang Tunai		
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 30 Juni 2024 dan
31 Desember 2023*

Keterangan	30-Jun-24	30-Jun-23
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		
Jumlah	-	-

*Piutang PNB
P0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNB 30 Juni 2024
dan 31 Desember 2023*

Uraian	30-Jun-24	31-Dec-23
Piutang PNB		
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp0

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

No.	Uraian	30-Jun-24	31-Dec-23
1			
2			
Jumlah			

Bagian Lancar Tagihan C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rp0

*Rincian Bagian Lancar TPA per 30 juni 2024 dan 31
Desember 2023*

No.	Uraian	30-Jun-24	31-Dec-22
1			
2			
Jumlah			

Penyisihan Piutang C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Piutang Tak Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Tertagih – Piutang Lancar Rp 0 per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Tidak terdapat belanja dibayar dimuka pada

Tahun Anggaran 2024. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-23
Pembayaran Sewa Kendaraan	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 31 Desember 20123

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp 0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-23
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-
Persediaan Strategis untuk berjaga jaga	-	-
Jumlah	-	-

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 30 Juni 2024 dan
31 Desember
2023*

No	Debitur	30-Jun-24	31-Dec-23
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Jumlah		-	-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

No	Debitur	30-Jun-19	31-Dec-18
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang 30 Juni 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp0. Tidak terdapat aset tetap berupa tanah baik di 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2024	0

Peralatan dan

Mesin

Rp0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo Per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
nilai Buku per 30 Juni 2024	-
nilai Buku per 30 Juni 2024	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- Tidak terdapat KDP di 30 Juni 2024

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0 dan (Rp0),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin			0
2	Gedung dan Bangunan			0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			0
4	Aset Tetap Lainnya			0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Aset Lain-Lain

C.22 Aset Lain-Lain

Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software			0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain			0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp80.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp80.000.000 dan Rp80.000.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	30-Jun-24	31-Dec-23
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp0*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Pendapatan

PNBP

Rp0

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa			#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain			#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Tidak terdapat pendapatan Negara Bukan Pajak Baik di 30 Juni 2024 maupun 30 Juni 2023.

Beban

Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	
Beban Gaji			
Beban Tunjangan-tunjangan			
Beban Honorarium dan Vakasi			
Beban Lembur			
Jumlah	0	0	

*Beban
Persediaan
Rp0*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi			
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Beban Barang
dan Jasa
Rp727.440.505,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp727.440.505,- dan Rp588.367.275,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024	Pengembalian Belanja	30-Jun-23
Beban Barang Operasional			
Beban Bahan	165.737.815		10.270.000
Beban Honor Output Kegiatan	16.200.000		2.850.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	337.098.690		35.000.000
Beban Barang nNon Opr - Penanganan Pandemi			131.969.000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya			
Beban Jasa Pos dan Giro			
Beban Sewa	107.804.000		220.740.000
Beban Jasa Profesi	1.800.000		4.600.000
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi			78.762.000
Beban Jasa Lainnya	98.800.000		
Jumlah	727.440.505	0	484.191.000

Beban

Pemeliharaan

Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	Pengembalian	30-Jun-23
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Beban Pemeliharaan Lainnya			
Jumlah	0	0	0

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp506.174.295

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp506.174.295 dan Rp136.622.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	Pengembalian Belanja	30-Jun-23
Beban Perjalanan Biasa	342.794.295	0	133.005.400
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.030.000	0	8.850.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.600.000	0	21.000.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.750.000	0	0
Jumlah	506.174.295	0	162.855.400

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Bantuan*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah

Sosial Rp0

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		-	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software		-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain		-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			0,00
Jumlah	0	0	0,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat			
Penjualan Alat Kantor			
Selisih Kurs			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)		0	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,36

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			0,00
Beban Perjalanan Dinas			0,00
Beban Persediaan			0,00
Jumlah	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp53.598.934

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO

(Rp1.233.345.459)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar (Rp1.233.345.459) dan (Rp1.059.022.015). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	
Suku Cadang	
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 30 Juni 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

Transaksi
Antar Entitas
Rp1.179.746.525

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.179.746.525 dan Rp1.059.022.015. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagikan ke Entitas Lain	1.233.345.459
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1.233.345.459

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp1.233.345.459,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas

lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kemasyarakat	Ditjen Imigrasi	
2	Peralatan dan Mesin	Ditjen Imigrasi	
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. yang merupakan transfer keluar barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat ke Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Transfer keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang/persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	Ditjen Imigrasi	
	Jumlah		

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			
2			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
(Rp0)

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-

LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648992) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM

Tgl Cetak : 04/07/24 3:26 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	727,440,505	588,367,275	139,073,230	23.637
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	506,174,295	470,654,740	35,519,555	7.547
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648992) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM

Tgl Cetak : 04/07/24 3:26 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(269,341)	0	(269,341)	()
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,233,345,459	1,059,022,015	174,323,444	16.461
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,233,345,459)	(1,059,022,015)	(174,323,444)	16.461
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,233,345,459)	(1,059,022,015)	(174,323,444)	16.461
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,233,345,459)	(1,059,022,015)	(174,323,444)	16.461

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648992) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:21 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:26 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	53,598,934	0	53,598,934	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,233,345,459)	(1,059,022,015)	(174,323,444)	16.46
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,179,746,525	1,059,022,015	120,724,510	11.4
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(53,598,934)	0	(53,598,934)	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN IMIGRASI 06
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648992

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:26 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	53,868,275	53,868,275	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	53,868,275	53,868,275	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	53,868,275	53,868,275	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,447,456,000	1,233,614,800	(1,213,841,200)	50	1,801,192,000	1,059,022,015	742,169,985	59
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,447,456,000	1,233,614,800	(1,213,841,200)	50	1,801,192,000	1,059,022,015	742,169,985	59
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN IMIGRASI 06
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648992

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:26 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,447,456,000	1,233,614,800	(1,213,841,200)	50	1,801,192,000	1,059,022,015	742,169,985	59
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 648992 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/07/24 3:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/7/24 1:23 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	365,499,000	396,225,000	165,737,815	0	165,737,815	41.83	230,487,185
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	126,000,000	77,400,000	16,200,000	0	16,200,000	20.93	61,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	614,400,000	589,400,000	337,098,690	0	337,098,690	57.19	252,301,310
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,105,899,000	1,063,025,000	519,036,505	0	519,036,505	48.83	543,988,495
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	128,356,000	179,190,000	107,804,000	0	107,804,000	60.16	71,386,000
522151	Belanja Jasa Profesi	71,100,000	40,500,000	1,800,000	0	1,800,000	4.44	38,700,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	200,000,000	98,800,000	0	98,800,000	49.4	101,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	199,456,000	419,690,000	208,404,000	0	208,404,000	49.66	211,286,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	599,876,000	522,326,000	342,794,295	0	342,794,295	65.63	179,531,705
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,300,000	12,240,000	3,030,000	0	3,030,000	24.75	9,210,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	158,375,000	158,375,000	18,600,000	0	18,600,000	11.74	139,775,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	368,550,000	271,800,000	141,750,000	0	141,750,000	52.15	130,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,142,101,000	964,741,000	506,174,295	0	506,174,295	52.47	458,566,705
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,447,456,000	2,447,456,000	1,233,614,800	0	1,233,614,800	50.4	1,213,841,200
	JUMLAH BELANJA	2,447,456,000	2,447,456,000	1,233,614,800	0	1,233,614,800	50.4	1,213,841,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 648992 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/07/24 3:27 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/7/24 1:23 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	365,499,000	396,225,000	165,737,815	0	165,737,815	41.83	230,487,185
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	126,000,000	77,400,000	16,200,000	0	16,200,000	20.93	61,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	614,400,000	589,400,000	337,098,690	0	337,098,690	57.19	252,301,310
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,105,899,000	1,063,025,000	519,036,505	0	519,036,505	48.83	543,988,495
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	128,356,000	179,190,000	107,804,000	0	107,804,000	60.16	71,386,000
522151	Belanja Jasa Profesi	71,100,000	40,500,000	1,800,000	0	1,800,000	4.44	38,700,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	200,000,000	98,800,000	0	98,800,000	49.4	101,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	199,456,000	419,690,000	208,404,000	0	208,404,000	49.66	211,286,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	599,876,000	522,326,000	342,794,295	0	342,794,295	65.63	179,531,705
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,300,000	12,240,000	3,030,000	0	3,030,000	24.75	9,210,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	158,375,000	158,375,000	18,600,000	0	18,600,000	11.74	139,775,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	368,550,000	271,800,000	141,750,000	0	141,750,000	52.15	130,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,142,101,000	964,741,000	506,174,295	0	506,174,295	52.47	458,566,705
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,447,456,000	2,447,456,000	1,233,614,800	0	1,233,614,800	50.4	1,213,841,200
	JUMLAH BELANJA	2,447,456,000	2,447,456,000	1,233,614,800	0	1,233,614,800	50.4	1,213,841,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: 013

: 06

: 2900

: 648992

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI

BANTEN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.P.E1.1

Tanggal : 04/07/24 3:28 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53,868,275	0	53,868,275	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	53,868,275	0	53,868,275	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	53,868,275	0	53,868,275	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	53,868,275	0	53,868,275	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648992) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:21 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:27 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	80,000,000	0	80,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	53,868,275	(53,868,275)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(269,341)	269,341	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	53,598,934	(53,598,934)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	80,000,000	53,598,934	26,401,066	49.26
JUMLAH ASET	80,000,000	53,598,934	26,401,066	49.26
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	80,000,000	0	80,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	80,000,000	0	80,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	80,000,000	0	80,000,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	53,598,934	(53,598,934)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	53,598,934	(53,598,934)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	53,598,934	(53,598,934)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	80,000,000	53,598,934	26,401,066	49.26

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648992) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:27 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	80,000,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	80,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,233,614,800
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	53,868,275	0
0.0	391111	Ekuitas	0	53,598,934
3.0	521211	Beban Bahan	165,737,815	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	16,200,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	337,098,690	0
3.0	522141	Beban Sewa	107,804,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	98,800,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	342,794,295	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,030,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,600,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141,750,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	269,341
JUMLAH			1,367,483,075	1,367,483,075

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



LAPORAN KEUANGAN

UAKPA 648991

YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

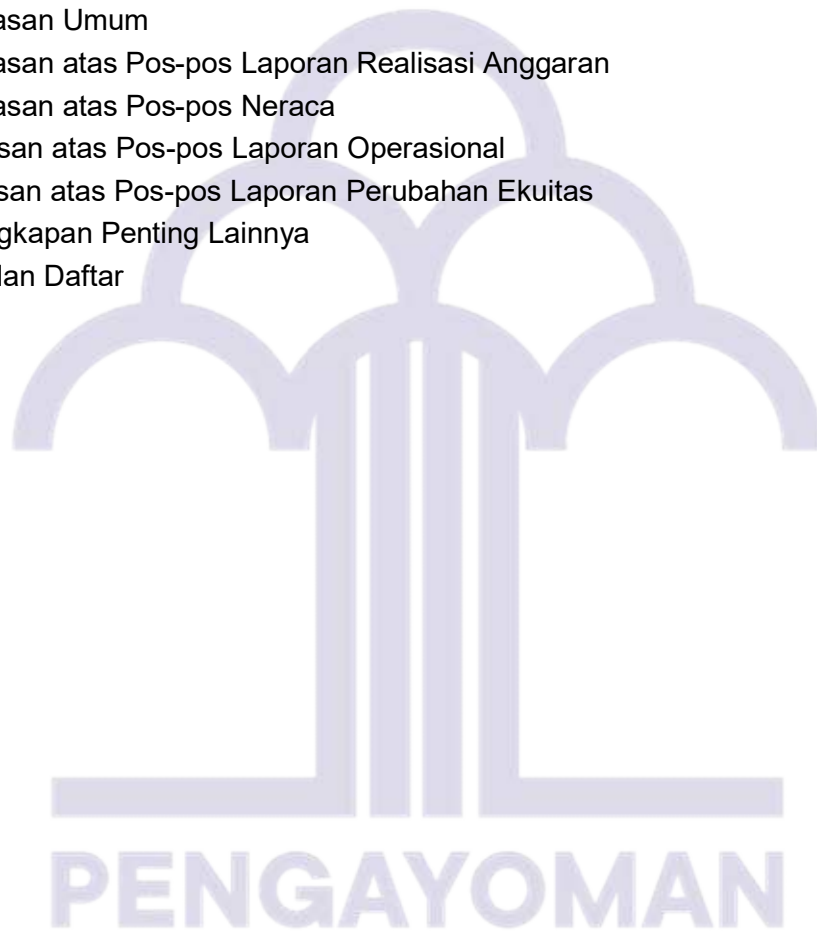
Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoewanto
NIP 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

PENGAYOMAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp788.745.600,- atau mencapai 99,9% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp788.886.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2024. Nilai Aset per per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp77.554.800,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp77.554.800,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp77.554.800,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp847.823.602,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp847.823.602,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp847.823.602,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp34.128.202,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp847.823.602,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp891.250.200,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp77.554.800,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.05)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	896.956.000	449.062.493	50,07	427.950.000
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		896.956.000	449.062.493	50,07	427.950.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.05)
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	50.200.200	77.554.800
Jumlah Aset Lancar		80.200.200	77.554.800
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		80.200.200	77.554.800
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	30.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		30.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	50.200.200	77.554.800
JUMLAH EKUITAS		50.200.200	77.554.800
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		80.200.200	77.554.800

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.05)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	27.354.600	34.128.202
Beban Barang dan Jasa	D.4	154.445.000	133.755.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	294.617.493	294.195.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		476.417.093	462.078.202
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(476.417.093)	(462.078.202)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(476.417.093)	(462.078.202)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(476.417.093)	(462.078.202)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.05)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	77.554.800	34.128.202
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(476.417.093)	(847.823.602)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	449.062.493	891.250.200
EKUITAS AKHIR	E.5	50.200.200	77.554.800

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.05) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara;
3. Pemberian perizinan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

• Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

• **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

• **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05)* melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.05.2.648991/2023 tanggal 17 November 2023. Satker 648991 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648991 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	896.956.000	896.956.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	896.956.000	896.956.000

Realisasi

B.1 Pendapatan

*Pendapatan
Rp0,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.05).

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja

Negara

Rp449.062.493,-

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp449.062.493,- atau 50% dari anggaran belanja sebesar Rp896.956.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	896.956.000	449.062.493	50,07
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	896.956.000	449.062.493	50,07
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	896.956.000	449.062.493	50,07

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 4% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan DIPA.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	449.062.493	427.950.000	4,93
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	449.062.493	427.950.000	4,93

*Belanja
Pegawai
Rp0,-,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2024 atau TA 2023.

Belanja

Barang

Rp449.062.493,

-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp449.062.493,- dan Rp427.950.000,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 4% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan oleh lebih maksimalnya penggunaan anggaran pada DIPA 648991 dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2023 terdapat AA yang baru dibuka mendekati akhir tahun.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional		-	-
Belanja Bahan	124.645.000	77.510.000	
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.000.000	-	-
Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi		35.145.000	(100,00)
Belanja Sewa		-	
Belanja Jasa Profesi	19.800.000	21.100.000	(6,16)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19		-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	294.617.493	294.195.000	0,14
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	449.062.493	427.950.000	4,93
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	449.062.493	427.950.000	4,93

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2024 dan 2023

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024
dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2024 atau TA 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	-	-	-
Peralatan Komputer	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja modal lainnya pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2023 hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tahun 2024 dan 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Buku-buku perpustakaan (monografi)	-	-	-
Rak Besi	-	-	-
Lemari Besi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2024 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp30.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

Kas Lainnya

dan Setara Kas

Rp0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,-,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp0,-,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp0,-,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Rp0,-,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

Belanja

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Dibayar di

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Muka

Rp0,-,-

Pendapatan

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

yang Masih

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

Harus Diterima

Rp0,-

Persediaan

C.10 Persediaan

Rp50.200.200,-

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp50.200.200,- dan Rp77.554.800,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp0,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan

Mesin

Rp0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan

Bangunan

Rp0,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan,Jaringan

dan Irigasi

Rp0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap

Lainnya

Rp0,-,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,-,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

*Aset Tak
Berwujud Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak

terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp30.000.000,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp30.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) per tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp50.200.200,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.200.200,-, dan Rp77.554.800,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNB pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai

Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan

Rp27.354.600,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.354.600,- dan

Rp34.128.202,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	27.354.600	34.128.202	
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	27.354.600	34.128.202	-

*Beban Barang dan
Jasa
Rp154.445.000,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp154.445.000,- dan Rp133.755.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2023
Beban Barang Operasional	-	-	-
Beban Bahan	124.645.000	-	77.510.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	10.000.000	-	-
Beban Barang Non Operasional Penanganan	-	-	35.145.000
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	19.800.000	-	21.100.000
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
JUMLAH	154.445.000	-	133.755.000

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban

Pemeliharaan Rp0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	Pengembalian Belanja	TH 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban BMP dan Pelumas Khusus	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja

Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp294.617.493,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp294.617.493,- dan Rp294.195.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	Pengembalian Belanja	TH 2023
Beban Perjalanan Biasa	215.353.104		203.540.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.770.000	-	8.700.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.494.389		27.855.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		54.100.000
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	294.617.493	-	294.195.000

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/ Jasa	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan mesin	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan Lisensi	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2024.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA
2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Kegiatan Non Operasional	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp77.554.800,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp77.554.800,- dan Rp34.128.202,- .

Defisit LO

Rp476.417.093,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp476.417.093,- dan Rp847.823.602,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp449.062.493,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp449.062.493,- dan Rp891.250.200,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN

maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	449.062.493
Transfer Masuk	421.704.063
Transfer Keluar	(421.704.063)
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	449.062.493

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Juni 2024, DDEL sebesar Rp0,-, sedangkan DKEL sebesar Rp449.062.493,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Masuk/Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp421.704.063,- dan Rp-421.704.063.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan

transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2024 dan 2023.

Ekuitas Akhir
Rp50.200.200,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.200.200,- dan Rp77.554.800,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 652306489911000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648991
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-1611/WPB.12/KP.05/2020
Tanggal : 24-07-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12.411.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana

3. Di TA 2024 ini tidak terdapat Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 (521131);

4. Di TA 2024 ini tidak terdapat Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 (522192);
5. Di TA 2024 ini terdapat Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 (521241), Belanja yang dilakukan pada Semester II, telah dilakukan revisi ke akun Belanja Bahan (521211) sesuai dengan arahan Surat Edaran dari Menteri Keuangan RI.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
dan BMN



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN 648999
(SEKRETARIAT JENDERAL / 013.01)**

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No. 44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id,
Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp310.568.583,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp10.653.953.400,- atau mencapai 58, persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.276.435.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp65.968.269.555,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp399.209.701,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp65.471.861.640,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp97.198.214,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.192.375.412,- dan Rp64.775.894.143,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp51.200.735,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp11.092.379.206,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp11.041.178.471,-. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.404.259,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp11.039.774.212,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp65.374.810.887,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp11.039.774.212,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp1.785.446,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.442.642.914,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp64.775.894.143,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.01) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	310.568.583	-	93.126.174
JUMLAH PENDAPATAN		-	310.568.583	0,00	93.126.174
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	9.979.694.000	5.400.516.839	54,12	5.069.714.007
Belanja Barang	B.4	7.930.178.000	4.886.874.561	61,62	4.149.011.012
Belanja Modal	B.5	366.563.000	366.562.000	100,00	377.933.220
Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
JUMLAH BELANJA		18.276.435.000	10.653.953.400	58,29	9.596.658.239

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.01) NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C1	324.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C2	2.763.910	-
Piutang Bukan Pajak	C3	3.060.202	223.578.920
Bagian Lancar TP/TGR			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C4	-	(1.117.895)
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C5	69.385.598	9.879.788
Jumlah Aset Lancar		399.209.710	232.340.813
ASET JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C6	44.142.991.000	44.142.991.000
Peralatan dan Mesin	C7	14.381.203.682	15.764.974.026
Gedung dan Bangunan	C8	22.545.715.469	22.610.168.921
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C9	109.218.442	109.218.442
Konstruksi dalam pengerjaan	C10	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C11	(15.707.266.953)	(17.457.873.734)
Jumlah Aset Tetap		65.471.861.640	65.169.478.655
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C12	-	-
Aset Lain-Lain	C13	1.867.112.330	2.852.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C14	(1.769.914.116)	(2.852.000)
Jumlah Aset Lainnya		97.198.214	-
Jumlah Aset		65.968.269.564	65.401.819.468
KESAJIBAN			
KESAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Muka dari KPPN	C15	324.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C16	707.229.152	-
Utang yang belum ditagihkan	C17	158.382.350	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C18	2.763.910	27.008.581
Hibah yang belum disahkan		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.192.375.412	27.008.581
Jumlah Kewajiban		1.192.375.412	27.008.581
KEKAYAAN			
KEKAYAAN EKUITAS			
Ekuitas	C19	64.775.894.143	65.374.810.887
Jumlah Ekuitas		64.775.894.143	65.374.810.887
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		65.968.269.555	65.401.819.468

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.01)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	51.200.735	48.395.662
JUMLAH PENDAPATAN		51.200.735	48.395.662
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.010.815.991	5.651.721.777
Beban Persediaan	D.3	103.253.558	90.241.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.826.731.479	2.468.810.507
Beban Pemeliharaan	D.5	1.222.286.850	1.252.387.356
Beban Perjalanan Dinas	D.6	930.409.223	520.733.330
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi		-	568.558.364
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.7	(1.117.895)	-
JUMLAH BEBAN		11.092.379.206	10.552.452.634
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.041.178.471)	(10.504.056.972)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	1.403.500	(461.312.389)
Surplus / defisit kegiatan non operasional lainnya	D.9	759	24.883.512
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.404.259	(436.428.877)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(11.039.774.212)	(10.940.485.849)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(11.039.774.212)	(10.940.485.849)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.01) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	65.374.810.887	61.260.660.338
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11.039.774.212)	(10.940.485.849)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.785.446)	(24.883.442)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLAS		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4	(1.785.446)	(24.883.442)
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	10.442.642.914	9.573.995.434
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.6	(598.916.744)	(1.391.373.857)
EKUITAS AKHIR	E.7	64.775.894.143	59.869.286.481

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 02 Juli 2024
Hal: Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2024.

**A.2.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN (03)**

*Profil dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pelaksana tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, salah satunya adalah provinsi Banten yang bertempat di Jalan Brigjen Syamun No.44 Kel. Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang. Awal Kantor Wilayah dibentuk pada tahun 1982 diberi nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Wilayah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Kanwil Kemenkumham terdiri dari 4 (empat) divisi yang terdiri dari :

1. Divisi Administrasi

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

2. Divisi Pemasyarakatan

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

3. Divisi Keimigrasian

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten membawahi 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 9 (sembilan) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 3 (tiga) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBAN), dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi.

Salah satu ciri khas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah terletak pada bangunan gedung JDI (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang menyerupai bangunan Belanda karena pada arsitektur pintu

dan jendelanya yang sejak awal pembangunan tidak pernah diganti dan dipertahankan sampai saat ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01). Rencana strategis Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan tugas dimaksud.

A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

A. Visi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada kompetensi inti (business) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia

yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

B. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

C. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung

jawab sedang dikerjakan. Ada pun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika, dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh kementerian adalah:

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana;
- b. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan negara lain, pembinaan pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
- f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) adalah 1 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

N	Kode	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan	Juml

o	Wil		K	K	D	T	ah
1	29 00	Kantor Wilayah Kementerian	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

• Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Tabel. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup:
 - barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai dan barang tak habis pakai;
 - bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, contohnya bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan;
 - barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan operasional.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.

2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

a. Tanah,

b. Gedung dan bangunan, dan

c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:

1) Jalan dan Jembatan

2) Bangunan Air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan

Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2018 tanggal 14 September 2018 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencaangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat

dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana,	10

Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan Semester I TA 2024, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01)* sudah 14 kali mengadakan revisi DIPA yaitu :

1. Revisi DIPA Ke 1 pada tanggal 12 januari 2024 yaitu revisi Kegiatan Prarekonsiliasi keuangan;
2. Revisi DIPA ke 2 pada tanggal 17 februari 2024 yaitu Revisi Hal 3 Dipa;
3. Revisi DIPA ke 3 pada tanggal 13 maret 2024 yaitu revisi Kegiatan Rencana aksi 2024;
4. Revisi DIPA ke 4 pada tanggal 28 maret 2024 yaitu revisi belanja operasional;
5. Revisi DIPA ke 5 pada tanggal 05 april 2024 yaitu revisi Hal 3 Dipa ;
6. Revisi DIPA ke 6 pada tanggal 02 mei 2024 yaitu revisi tentang ABT Operasional;
7. Revisi DIPA ke 7 pada tanggal 31 mei 2024 yaitu Revisi Belanja Operasional;
8. Revisi DIPA ke 8 pada tanggal 28 juni 2024 yaitu Revisi Penambahan Gaji P3K;
9. Revisi DIPA ke 9 pada tanggal 03 juli 2024 yaitu Revisi ABT Belanja Pegawai.

Sehingga rincian DIPA berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	8.323.322.000	9.979.694.000
Belanja Barang	7.885.178.000	7.930.178.000
Belanja Modal	366.563.000	366.563.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	16.575.063.000	18.276.435.000

Kanwil Kemenkumham Banten 648999 mendapat anggaran ABT sebanyak 2 kali yaitu pada bulan April 2024 belanja barang sebesar Rp45.000.000,- untuk belanja Pemeliharaan sewa kendaraan Pimpinan Tinggi Kanwil Banten dan ABT belanja Pegawai sebesar Rp 1.858.253.000,- pada bulan 28 Juni untuk.

Realisasi

Pendapatan

Rp310.568.583,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.310.568.583,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) berasal dari pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024

Uraian	2024		
	ANGGARAN	Realisasi	Realisasi
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.403.500	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	21.131.952	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	759	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		223.578.920	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		64.453.452	
Jumlah Belanja	-	310.568.583	-

Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) terdiri dari :

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp1.403.500,- merupakan lelang bongkaran Renov Gedung

Kantor.

2. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 21.535.131,-
3. Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp759,- merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yaitu pengembalian belanja pembulatan akibat dari pembayaran kekurangan gaji Bulan Nopember 2023 sd Januari 2024 untuk 31 Orang Pegawai.
4. Pendapatan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp223.578.920,- yaitu pengembalian belanja Barang akibat dari audit BPK RI Bulan Januari 2024 temuan terhadap belanja Barang tahun anggaran 2023 dengan rincian :
 - a. Pengembalian atas Audit BPK berupa UP/TUP Belanja Jamuan Tamu/ Pimpinan / Keperluan Perkantoran (521111) Rp 61.746.920,-
 - b. Pengembalian atas Audit BPK berupa UP/TUP Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) Rp34.222.000,-
 - c. Pengembalian atas Audit BPK berupa UP/TUP Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin (523121) Rp40.211.000,-
 - d. Pengembalian atas Audit BPK berupa UP/TUP Belanja Bahan (Spanduk,Barang Konsumsi, Penggandaan dll) (521211) Rp77.400.000,-
 - e. Pengembalian atas Audit BPK berupa UP/TUP Belanja Jasa Profesi (522151) Rp9.999.000,-
5. Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp64.453.452,- yaitu pengembalian belanja modal akibat dari audit Pengadaan Barang dan Jasa oleh BPK RI bulan Januari 2024 temuan terhadap belanja modal tahun anggaran 2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik/turun %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.403.500	246.330.000	(99,43)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	21.131.952	22.131.831	(4,52)
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	759	70	984,29
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	223.578.920	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	64.453.452	24.883.442	159,02
Jumlah Belanja	310.568.583	293.345.343	5,87

dibandingkan dengan TA 2022 realisasi pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,87 % hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2024 terdapat Pengembalian Akibat Temuan BPK RI.

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp

10.653.953.400,-

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp10.653.953.400,- atau 58,36% dari anggaran belanja sebesar Rp18.276.435.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.979.694.000	5.400.516.839	54,12
Belanja Barang	7.930.178.000	4.886.874.561	61,62
Belanja Modal	366.563.000	377.933.220	103,10
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	18.276.435.000	10.665.324.620	58,36
Pengembalian	-	-	-

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,02% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya dikarenakan masa pandemi sudah berakhir sehingga kegiatan kegiatan yang tertunda akibat pandemi bisa dilaksanakan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.400.516.839	5.069.769.775	6,52
Belanja Barang	4.886.874.561	4.149.011.012	17,78
Belanja Modal	366.562.000	377.933.220	(3,01)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	10.653.953.400	9.596.714.007	11,02

Belanja

Pegawai

Rp5.400.516.839

,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.400.516.839,- dan Rp5.069.769.775,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,52% dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan 5% yang ditetapkan oleh presiden yang tidak ada tahun 2023, penambahan jumlah pegawai dibandingkan tahun sebelumnya dan banyaknya pegawai yang menduduki jabatan fungsional sehingga tunjangan pun ikut meningkat.

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai dan Tunjangan PNS	5.291.264.436	4.985.652.065	6,13
Belanja Pegawai dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	109.255.000	91.358.000	19,59
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.400.519.436	5.077.010.065	25,72
Pengembalian Belanja Pegawai	2.597	7.240.290	-
Jumlah	5.400.516.839	5.069.769.775	6,52

*Belanja
Barang Rp
4.886.874.561
,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.886.874.561,- dan Rp4.149.011.012,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,78% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh sudah dicabutnya status darurat covid 19 sehingga beberapa kegiatan yang tertunda dilaksanakan pada saat pandemi bisa dilaksanakan pada saat ini.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.114.516.250	828.593.979	34,51
Belanja Barang Non Operasional	367.813.280	327.031.225	12,47
Belanja Jasa	1.192.784.949	1.208.157.303	(1,27)
Belanja Pemeliharaan	1.191.357.788	1.194.825.135	(0,29)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	857.642.935	517.993.330	65,57
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Belanja Persediaan Konsumsi	162.759.359	72.410.040	124,77
Jumlah Belanja Kotor	4.886.874.561	4.149.011.012	17,78
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	4.886.874.561	4.149.011.012	17,78

*Belanja Modal
Rp
366.562.000,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp366.562.000,- dan Rp377.933.220,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada TA 2024 Kanwil Banten 648999 terdapat belanja modal yaitu

Belanja Modal Peralatan Mesin pembelian 1 buah Pompa Air, 3 buah Lemari Kayu, 2 Buah Filling Kabinet Besi, 2 Buah Locker, 5 Buah Tabung Pemadam Rp14.360.000, 1 Buah CCTV, 3 Buah Kasur Springbed, 2 Buah Lemari Es, 7 Buah Ac Split, 4 Buah Tv, 1 Buah Soundsystem, 1 Buah Tripod Camera, 1 Buah Computer editing, 2 Buah Personal Computer, 6 buah Laptop, 1 Buah Keranjang Bola/Ring senilai Total Rp366.562.000,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan
31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.562.000	377.933.220	(3,01)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	366.562.000	377.933.220	(3,01)
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	366.562.000	377.933.220	(3,01)

Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi belanja modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3.65 %.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp366.562.000,- dan Rp377.933.220,-. Pada TA 2024 satker 648999 memiliki belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian 1 buah Pompa Air, 3 buah Lemari Kayu, 2 Buah Filling Kabinet Besi, 2 Buah Locker, 5 Buah Tabung Pemadam Rp14.360.000, 1 Buah CCTV, 3 Buah Kasur Springbed, 2 Buah Lemari Es, 7 Buah Ac Split, 4 Buah Tv, 1 Buah Soundsystem, 1 Buah Tripod Camera, 1 Buah Computer editing, 2 Buah Personal Computer, 6 buah Laptop, 1 Buah Keranjang Bola/ Ring senilai Total Rp366.562.000,-. Dibandingkan dengan TA 2023 realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 mengalami penurunan sebesar 3,01% dikarenakan sudah terpenuhinya fasilitas Gedung kantor dari belanja modal tahun anggaran yang lalu sehingga untuk tahun ini hanya membeli beberapa peralatan mesin yang belum terpenuhi di tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan mesin	366.562.000	377.933.220	(3,01)
Peralatan Komputer	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	366.562.000	377.933.220	(3,01)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	366.562.000	377.933.220	(3)

Rincian detail Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024

Kanwil Kemenkumham Banten

Uraian	Sat	Kuantitas	Nilai (Rp)
Pompa Air	Unit	1	16.500.000
Lemari Kayu	Buah	3	10.500.000
Filing Cabinet Besi	Buah	2	13.600.000
Locker	Buah	2	21.600.000
Tabung Pemadam Api	Buah	5	14.360.000
CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	33.750.000
Kasur/Spring Bed	Buah	3	24.858.000
Lemari Es	Buah	2	7.818.000
A.C. Split	Buah	7	42.867.000
Televisi	Buah	4	27.997.000
Sound System	Buah	1	10.798.000
Tripod Camera	Buah	1	3.500.000
Computer Editing	Buah	1	33.984.000
Personal Computer	Buah	2	20.000.000
Lap Top	Buah	6	60.000.000
Keranjang Bola/Ring	Buah	1	24.430.000
Total			366.562.000

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp324.000.000,-*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp324.000.000,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP (Uang Persediaan) atau TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Saldo sebesar Rp324.000.000,- terdiri dari :

1. Saldo UP sebesar Rp99.000.000,-
2. Saldo TUP sebesar Rp225.000.000,-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2.763.910,-*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp2.763.910,- dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas meliputi uang pungutan pajak bendahara pengeluaran dan Belanja LS yang belum dibayarkan kepada pelaksana kegiatan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2024 sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2024

KAS DAN SETARA KAS LAINNNYA	JUMLAH
Pungutan Pajak belum disetor	2.763.910
Jumlah	2.763.910

*Piutang Bukan
Pajak
Rp3.060.202,-*

C.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 2023 dan masing-masing adalah sebesar Rp3.060.202,- dan

Rp223.578.920,- Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024

Piutang Bukan Pajak	JUMLAH
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.060.202
Piutang Lainnya	-
Jumlah	3.060.202

Adapun Penerimaan Negara Bulan Pajak Setjen 648999 berupa sewa rumah dinas pembayaran gaji induk bulan Juli 2024 yang SP2Dnya baru akan terbit di tanggal 1 Juli 2024.

Persediaan

Rp69.385.598,-

C.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp69.385.598,- dan Rp9.879.788,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	69.385.598	9.879.788
Barang untuk Pemerliharaan		

Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	69.385.598	9.879.788

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp65.968.269.564,-

C.4. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Setjen (648999) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp65.968.269.564,- DAN Rp65.401.819.468,- -.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Ham Banten Setjen (648999) berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp44.142.991.000

C.4.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.142.991.000,- dan Rp44.142.991.000,- . Tanah seluas 3.560.m2 yang terletak di Jl. Brigjen KH Syamun No. 44 D Serang, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten sudah bersertifikat senilai Rp 15.191.357.000,- dan terdapat penambahan aset tetap tanah seluas 4.350m2

senilai Rp28.951.634.000,- tanah tersebut merupakan tanah ex gedung PKK yang sudah digabungkan dengan tanah gedung utama kemenkumham Banten pada tahun 2020.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	Rp44.142.991.000,-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Juni 2024	Rp44.142.991.000,-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	Rp -3,873,120,162,-
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	Rp40.269.870.838,-

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Tanah TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.560. m ²	Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44D	15.191.357.000
2	4.350. m ²	Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44D (ex Gedung PKK)	28.951.634.04

Jumlah	44.142.991.000

Peralatan dan

Mesin

Rp14.381.203.682,-

C.4.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.381.203.682,- dan Rp15.764.974.026,-.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2024	15,764,974,026
Mutasi tambah:	
Pembelian	366.562.000
Reklas Masuk	20.000.000
Transfer Masuk	118,034,968
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Susulan	(2,429,982)
Reklas Keluar	(20.000.000)
Transfer Keluar	(1,677,000)
Penghentian aset dari penggunaan	(1,871,850,330)
Saldo Per 30 Juni 2024	14.381.203.682
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(-12,526,925,752)
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	1.854.277.930

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

pembelian Belanja Modal Peralatan Mesin pembelian 1 buah Pompa Air, 3 buah Lemari Kayu, 2 Buah Filling Kabinet Besi, 2 Buah Locker, 5 Buah Tabung Pemadam Rp14.360.000, 1 Buah CCTV, 3 Buah Kasur Springbed, 2 Buah Lemari Es, 7 Buah Ac Split, 4 Buah Tv, 1 Buah Soundsystem, 1 Buah Tripod Camera, 1 Buah Computer editing, 2 Buah Personal Computer, 6 buah Laptop, 1 Buah Keranjang Bola/ Ring senilai Total Rp366.562.000,-

Transfer Masuk peralatan kantor antara lain 2 Laptop dan 4 Printer senilai Rp118,034,968,-

Gedung dan

Bangunan

Rp22.545.715.469,-

C.4.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp22.545.715.469,- dan Rp22.610.168.921,-.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	22.545.715.469
Koreksi Pencatatan	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	64.453.452
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	
Pengembangan Melalui KDP	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Transfer Keluar	
Saldo Per 30 Juni 2024	22.610.168.921
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-3,873,120,162
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	18,737,048,759

Koreksi Pencatatan nilai berkurang sebesar (Rp64.453.452,) terdiri dari Pengadaan Pekerjaan :

1. Bangunan Tempat Parkir Rp35.443.597,-
2. Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen Rp29.009.855,-

Aset Tetap Lainnya
Rp109.218.442,-

C.4.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp109.218.442,- dan 109.218.442,-.

Mutasi Aset tetap lainnya per tanggal pelaporan sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2023	109.218.442
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	109.218.442
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(11.522.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	97.695.942

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp15.707.266.953,-

C.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.707.266.953,- dan Rp15.457.873.734,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

Tabel
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

N o	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.381.203.682	12,526,925,752	1.854.277.930
2.	Gedung dan Bangunan	22.610.168.921	3,873,120,162	18,737,048,759
3.	Aset Tetap Lainnya	109.218.442	11.522.500	97.695.942
	Jumlah	37.100.591.045	16.411.568.414	17.016.462.780

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
89.721.428,-

C.5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp89.721.428,- dan Rp0,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Lain-Lain

Rp1.867.112.330,-

C.5.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp1.867.112.330,- dan Rp2.852.000,-. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) . Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	2.852.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-1864.260.330
Saldo Per 30 Juni 2024	1.867.112.330,-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	-1.777.390.902
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	89.721.428,-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari reklasifikasi 510 item yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp1.867.112.330,-

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

(Rp1.777.390.902,-)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp1.777.390.902) dan (Rp2.852.000). Rincian akumulasi

penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2024
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain	1.867.112.330	1.777.390.902	89.721.428
	Jumlah	1.867.112.330	1.777.390.902	89.721.428
	Total	1.867.112.330	1.777.390.902	89.721.428

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai 89.721.428. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp707.229.152,-

C.6. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp707.229.152,- dan Rp0,-. Utang Pihak Ketiga merupakan Beban yang masih terjadi pada tahun berjalan dan belum dibayarkan sampai dengan akhir pelaporan. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Semester I TA 2024

Utang kepada Pihak Ketiga	JUMLAH
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	610.299.152
Belanja barang yang masih harus dibayar	96.930.000
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
Jumlah	707.229.152

Kanwil Kumham Banten 648999 terdapat Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp610.299.152,- yaitu Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2024 yang SP2Dnya muncul di tanggal 01 Juli 2024 dan terdapat Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran Belanja Barang berupa Jasa Kebersihan,Keamanan dan Driver pada Kanwil Banten TA 2024 Termin-6 sesuai Kontrak No:W12.PB.02.01-1294 tgl 29-12-23 BAPP No:W12.PB.02.01-790 tgl 24-6-24 BAP W12.P B.02.01-791 tgl 24-6-24 senilai Rp96.930.000,- yang SP2D nya terbit ditanggal 1 Juli 2024.

Utang yang Belum

Ditagihkan

Rp158.382.350,-

C.7 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp158.382.350,- dan Rp0,-. Utang yang belum Ditagihkan meliputi Utang yang belum diterima tagihannya, yaitu belanja yang sudah diterima BAST nya namun belum diterbitkan Surat Perintah Bayar. Kanwil Kumham Banten 648999 terdapat utang yang belum ditagihkan merupakan Kwitansi yang belum dibuatkan spmnya senilai Rp158.382.350,-

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp0,-

C.8 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp27.008.581,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menyetorkan ke Kas Negara atas PNBPN pelayanan jasa hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat, untuk transaksi belanja dibayar dimuka akan dilakukan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2023.

Ekuitas

Rp64.066.115.896,-

C.9 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp64.066.115.896,- dan Rp65.374.810.887,-. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp51.200.735,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp51.200.735,- dan Rp48.395.662,- pendapatan tersebut merupakan pendapatan Negara bukan pajak.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	51.200.735	48.395.662	5,80
Jumlah	51.200.735	48.395.662	5,80

Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 51.200.735,- Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai PNB pada LRA dan nilai akun-akun terkait pengakuan PNB secara akrual pada neraca tidak terdapat selisih.

Beban Pegawai
Rp6.010.815.991,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.010.815.991,- dan Rp5.651.721.777,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Beban belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan 4.44 % dari tahun anggaran sebelumnya hal ini disebabkan karena ditahun 2024 ini ada kenaikan gaji 5% dari tahun sebelumnya dan adanya penambahan pegawai p3k sebanyak 3 orang tenaga kesehatan.

*Rincian Beban Pegawai
30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	5.291.261.782	5.560.363.777	- 4,84
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	109.255.057	91.358.000	19,59
Jumlah	5.400.516.839	5.651.721.777	- 4,44

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp103.253.558,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp103.353.558,- dan Rp90.241.300,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	103.253.558	90.241.300	14,42
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	103.253.558	90.241.300	14,42

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2.826.731.479,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.826.731.479,- dan .468.810.507,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2023
Beban Keperluan Perkantoran	1.209.199.250,		815.654.101,
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.244.000,		5.478.378,
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17.724.000,		57.750.000,
Beban Barang Operasional Lainnya	7.107.000,		18.805.300,
Beban Barang Operasional -	0,		6.966.200,
Beban Bahan	281.498.280,		231.599.225,
Beban Honor Output Kegiatan	283000000		35.900.000,
Beban Barang Non Operasional	83.474.000,		58.500.000,
Beban Peralatan dan Mesin -			30.000.000,
Beban Langganan Listrik	202.540.164,		187.368.325,
Beban Langganan Telepon			2.335.274,
Beban Sewa	972.160.000,		968.910.000,
Beban Jasa Profesi	3.800.000,		8.600.000,
Beban Jasa Lainnya	19.684.785,		32.287.976,
Beban Jasa - Penanganan			8.655.728,
Beban Aset Ekstrakomtabel			
JUMLAH	2.826.731.479	0	2.468.810.507
Jumlah Beban Barang dan Jasa		2.826.731.479	

Beban

Pemeliharaan

Rp1.222.286.850,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.222.286.850,- dan Rp1.252.387.356,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	Pengembalian Belanja	TH 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	653.081.400,	-	700.435.448,
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya		-	
Beban BMP dan Pelumas Khusus		-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	569.205.450,	-	551.951.908,
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0,	-	0,
Beban Persediaan untuk Suku Cadang		-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	
Beban Pemeliharaan Jaringan		-	
Beban Pemeliharaan Lainnya		-	
Jumlah	1.222.286.850	-	1.252.387.356

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A	Beban Pemeliharaan LO	1.222.286.850
B	Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	1.222.286.850
C	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
D	Beban Persediaan Suku Cadang	-
E	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO (c + d)	1.222.286.850
F	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	653.081.400
G	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	569.205.450
H	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-
I	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	-
J	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	-
K	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	-
L	Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	-
M	Beban Pemeliharaan Total = b + e - l	1.222.286.850
	Selisih (a - m)	0

Tidak terdapat selisih antara LRA dan LO.

Beban Perjalanan Dinas
Rp930.409.223,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp930.409.223,- dan Rp520.733.330,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	Pengemb alian Belanja	TH 2023
Beban Perjalanan Biasa	764.219.223,		503.483.330,
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.350.000,	-	17.250.000,
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.840.000		-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	930.409.223	-	520.733.330

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp711.778.247,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp711.778.247,- dan Rp568.558.364,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk

mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortalisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortalisasi
TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan mesin	411.737.438	251.929.767
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	292.564.023	225.598.304
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.476.786	11.433.471
Beban Penyusutan Amortilisasi Software	-	-
Beban Penyusutan Lisensi	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortilisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional	-	-
Jumlah	711.778.247	488.961.542

*Surplus Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp1.403.500,-*

D.8 Surplus Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten 648999 merupakan pendapatan hasil Penjualan/Lelang Barang Persediaan, Aset Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang dihapuskan.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.403.500,- dan Rp246.330.000,-.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp759,-*

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp759,- dan Rp24.883.512,-.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.65.374.810.887,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.374.810.887,- dan Rp61.260.660.338,-.

Defisit LO

Rp11.751.552.459,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp11.751.552.459,- dan Rp10.940.485.849,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non

Revaluasi

(Rp1.785.446,-)

E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.785.446,- dan Rp24.863.442,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Terdapat koreksi atas reklasifikasi sebesar (Rp1.785.446,-) terdiri dari Rp24.863.442,- merupakan koreksi akibat temuan BPK RI pekerjaan TA 2023, dan Rp1.785.446,- merupakan koreksi dari akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan aset tetap.

Transaksi Antar

Entitas

Rp10.444.642.914,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.444.642.914,- dan Rp9.537.995.434,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.653.953.400,
Diterima dari Entitas Lain	-310.568.583,
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	101.258.097,
Pengesahan Hibah Langsung	
Jumlah	10.444.642.914

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar (310.568.583,-) sedangkan DKEL sebesar Rp10.653.953.400,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp101.258.097,- dan Transfer keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0,-.

Ekuitas Akhir
Rp64.066.115.896,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp64.066.115.896,- dan Rp59.869.286.481,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 008401002645307
Nama Rekening : BBPG020 KNWL HUKUM DAN HAM
BANTEN 648999
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-223/WPB.11/KP.020/2015
Tanggal : 17-02-2015

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-14 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2024, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 :

KPA : Dodot Adikoeswanto

PPK : Emiel Amarulla

dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-01 Tahun 2024 pada tanggal 01 Januari 2024 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran :

Bendahara : Hafin Jaya Wardana

2. Rincian Capaian Kinerja sampai dengan Juni 2024 untuk DIPA Setjen Kanwil Banten antara lain :

1. Layanan Perkantoran Kanwil telah dilaksanakan

50 %

2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal telah dilaksanakan 50 %
3. Layanan Umum telah dilaksanakan 50 %
4. Layanan Sarana Internal telah dilaksanakan 50 %
5. Layanan Prasarana Internal telah dilaksanakan 50 %
6. Layanan SDM telah dilaksanakan 50%
7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal telah dilaksanakan 50 %
8. Layanan Kehumasan dan Protokoler telah dilaksanakan 50%
9. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal telah dilaksanakan 50 %
10. Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah dilaksanakan 50%.
11. Layanan Dukungan Manajemen Satker telah dilaksanakan 50 % .
12. Layanan Perkantoran telah dilaksanakan 50%.

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
648994

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Berakhir Tanggal
30 Juni 2024



2024

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
(08/648994)**

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar .	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL. KH. SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp275.338.500,- atau mencapai 55.22% dari alokasi anggaran sebesar Rp498.635.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2024. Nilai Aset per per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.000.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp20.000.000,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp20.000.000,- dan Rp20.000.000,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp275.338.500,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai (Rp275.338.500),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp275.338.500),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(275.335.500),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp275.33.500,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.08) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	498.635.000	275.338.500	55	204.791.000
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		498.635.000	275.338.500	55	204.791.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.08)
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	31-Dec-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		-
Piutang Bukan Pajak	C.4		-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		-
Belanja Dibayar di Muka	C.8		-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		-
Persediaan	C.10		-
Persediaan Belum Diregister	C.11		-
Jumlah Aset Lancar		20.000.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		20.000.000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	20.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25		-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26		-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27		-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		20.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28		-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.08)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	125.041.500	87.425.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	150.297.000	117.366.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		275.338.500	204.791.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(275.338.500)	(204.791.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(275.338.500)	(204.791.000)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(275.338.500)	(204.791.000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.08)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(275.338.500)	(204.791.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	275.338.500	204.791.000
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan

- bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
 5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara lain :

1. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan HAM
3. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten kota

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) .

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

• **Pendapatan- LRA**

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

• **Pendapatan- LO**

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

• **Belanja**

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

• **Beban**

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

• **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

-) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
-) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
-) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

-) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
-) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
-) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
-) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

-) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

o **Kewajiban**

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.)* melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.08.2.648994/2024 tanggal 23 November 2023. Satker 648994 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648994 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	498.635.000	498.635.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	498.635.000	498.635.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.08) .

*Realisasi
Belanja
Negara Rp
275.338.500*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp275.338.000,- atau 55.22% dari anggaran belanja sebesar Rp338.635.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	498.635.000	275.338.500	55,22
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	498.635.000	275.338.500	55,22
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	498.635.000	275.338.500	55,22

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan menjadi kurang lebih 61.65% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan nilai DIPA pada satker 648994.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	275.338.500	170.330.000	61,65
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	275.338.500	170.330.000	61,65

Belanja

Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di

TA 2024 atau TA 2023.

Belanja

Barang Rp

275.338.500,

-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp dan Rp373.635.000-,. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 55% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi	0		
Belanja Barang Non Operasional			
Belanja Bahan	123.241.500	77.901.000	
Belanja Jasa	1.800.000	9.524.000	(81,10)
Belanja Pemeliharaan			-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	150.297.000	117.366.000	28,06
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid			#DIV/0!
Belanja Persediaan Konsumsi			
Jumlah Belanja Kotor		204.791.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	275.338.500	204.791.000	34,45

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 20223 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2024 dan 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024
dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2024 atau TA 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA
2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	-	-	-
Peralatan Komputer	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2024.

*Belanja
Modal Rp 0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Realisasi Belanja modal lainnya pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2022 hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tahun 2024 dan 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Buku-buku perpustakaan (monografi)	-	-	-
Rak Besi	-	-	-
Lemari Besi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2024 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

Rp20.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara

Penerimaan

Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

Kas Lainnya

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

dan Setara Kas

Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan

Mesin

Rp0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan

Bangunan

Rp0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan,Jaringan

dan Irigasi

Rp0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap

Lainnya

Rp0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0,- dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp0
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp0*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi

digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp20.000.000,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.000.000,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) per tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Pendapatan PNB
Pendapatan PNB

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Pendapatan PNB pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai
Beban Pegawai
Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada *Rincian Beban Pegawai* 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	-	-	-

Beban Barang dan
Jasa Rp87.425.000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp87.425.000,- dan Rp68.025.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi

belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-21	PENGEMBALI AN BELANJA	TH 2020
Beban Bahan	45.390.700	-	6.200.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	225.000	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	5.600.000	-	4.300.000
Beban Barang Persediaan-Penanganan Pa	-	-	14.200.000
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	51.215.700	-	24.700.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa		51.215.700	

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban

Pemeliharaan Rp0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

*Tabel. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan
30 Juni
2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	Pengembalian Belanja	TH 2020
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban BMP dan Pelumas Khusus	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	0	-	0

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp117.366.000,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp117.366.000,- dan Rp102.305.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	Pengembalian Belanja	TH 2020
Beban Perjalanan Biasa	48.150.000		46.252.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000	-	2.100.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			8.525.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.100.000		-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	67.200.000	-	56.877.000

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Barang untuk Diserahkan

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

kepada
Masyarakat
Rp0

pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Beban Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/ Jasa	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Beban Penyusutan Peralatan mesin	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortisasi Software		
Beban Penyusutan Lisensi		
Beban Penyusutan Aset Lainnya		
Beban Penyusutan Amortisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional		
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional		
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada

saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

Beban Lain-lain Rp0,- **D.11 Beban Lain-lain**

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2023.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	30-Jun-20	30-Jun-19	NAIK (TURUN) %
Kegiatan Non Operasional	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

Defisit LO

Rp(275.338.500),-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp (275.338.500),- dan Rp(204.791.000),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp275.338.500,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp275.338.500,- dan Rp204.791.000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagikan ke Entitas Lain	275.338.500
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	275.338.500

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DBEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp275.338.500,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2024 dan 2023.

Ekuitas Akhir Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 651066489941000
Nama Rekening : BBPG020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648994
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-1162/WPB.12/KP.05/2020
Tanggal : 17-06-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.140.KU.03.03 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai:

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.270.270.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W12.02.KU.03.03 Tahun 2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023:

Bendahara Pengeluaran : Hafin Jaya Wardhana

LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648994) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:21 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:21 PM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0	20,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	20,000,000	0	20,000,000	
JUMLAH ASET	20,000,000	0	20,000,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0	20,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20,000,000	0	20,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	20,000,000	0	20,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,000,000	0	20,000,000	

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 08
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648994

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:21 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	498,635,000	275,338,500	(223,296,500)	55	373,635,000	204,791,000	168,844,000	55
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	498,635,000	275,338,500	(223,296,500)	55	373,635,000	204,791,000	168,844,000	55
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 08
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648994

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:21 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	498,635,000	275,338,500	(223,296,500)	55	373,635,000	204,791,000	168,844,000	55
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 08
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648994
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 04/07/24 3:23 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 4/7/24 1:23 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	148,495,000	150,375,000	123,241,500	0	123,241,500	81.96	27,133,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	148,495,000	150,375,000	123,241,500	0	123,241,500	81.96	27,133,500
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	315,160,000	312,440,000	126,007,000	0	126,007,000	40.33	186,433,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,980,000	34,020,000	24,290,000	0	24,290,000	71.4	9,730,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	348,140,000	346,460,000	150,297,000	0	150,297,000	43.38	196,163,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	498,635,000	498,635,000	275,338,500	0	275,338,500	55.22	223,296,500
	JUMLAH BELANJA	498,635,000	498,635,000	275,338,500	0	275,338,500	55.22	223,296,500

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648994) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:21 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:20 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(275,338,500)	(204,791,000)	(70,547,500)	34.45
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	275,338,500	204,791,000	70,547,500	34.45
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 08
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648994
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/07/24 3:22 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/7/24 1:23 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	148,495,000	150,375,000	123,241,500	0	123,241,500	81.96	27,133,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	148,495,000	150,375,000	123,241,500	0	123,241,500	81.96	27,133,500
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	315,160,000	312,440,000	126,007,000	0	126,007,000	40.33	186,433,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,980,000	34,020,000	24,290,000	0	24,290,000	71.4	9,730,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	348,140,000	346,460,000	150,297,000	0	150,297,000	43.38	196,163,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	498,635,000	498,635,000	275,338,500	0	275,338,500	55.22	223,296,500
	JUMLAH BELANJA	498,635,000	498,635,000	275,338,500	0	275,338,500	55.22	223,296,500

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648994) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:21 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	275,338,500
3.0	521211	Beban Bahan	123,241,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	126,007,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,290,000	0
JUMLAH			295,338,500	295,338,500

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648994) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM

Tgl Cetak : 04/07/24 3:19 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	125,041,500	87,425,000	37,616,500	43.027
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	150,297,000	117,366,000	32,931,000	28.058
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648994) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:19 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	275,338,500	204,791,000	70,547,500	34.449
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(275,338,500)	(204,791,000)	(70,547,500)	34.449
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(275,338,500)	(204,791,000)	(70,547,500)	34.449
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(275,338,500)	(204,791,000)	(70,547,500)	34.449

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



LAPORAN KEUANGAN

KANWIL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN

11/648997

UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL.KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0254. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp125.285.000,- atau mencapai 50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp249.259.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.000.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp15.000.000,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp125.285.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai (Rp125.285.000,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp125.285.000,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp125.285.000,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp125.285.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.11) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% Thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	249.259.000	125.285.000	50,26	150.374.500
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		249.259.000	125.285.000	50,26	150.374.500

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.11)
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
ASET			-
ASET LANCAR			-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	15.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		15.000.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			-
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			-
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			-
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		15.000.000	-
KEWAJIBAN			-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			-
Uang Muka dari KPPN	C.24	15.000.000	-
Utang yang belum ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		15.000.000	-
EKUITAS			-
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.11)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN
30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	46.675.000	66.491.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	78.610.000	83.883.500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		125.285.000	150.374.500
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(125.285.000)	(150.374.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(125.285.000)	(150.374.500)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(125.285.000)	(150.374.500)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.11)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 31
DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(125.285.000)	(150.374.500)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	125.285.000	150.374.500
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.11) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu dalam tahapan legislasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 September 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

• Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

• Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**
 - Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai

nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	100%

	pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11)* melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.11.2.648997/2023 tanggal 30 November 2022. Satker 648997 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648997 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	249.259.000	249.259.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	249.259.000	249.259.000

Realisasi

B.1 Pendapatan

*Pendapatan
Rp0,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.11).

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja

Negara

Rp125.285.000,-

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp125.285.000,- atau 50,26% dari anggaran belanja sebesar Rp249.259.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	249.259.000	125.285.000	50,26
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	249.259.000	125.285.000	50,26
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	249.259.000	125.285.000	50,26

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 16,68% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	125.285.000	150.374.500	(16,68)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	125.285.000	150.374.500	(16,68)

*Belanja
Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2024 atau TA 2023.

Belanja

Barang

Rp125.285.000,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp125.285.000,- dan Rp150.374.500. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 16,68% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang non operasional sebesar 1,10%, penurunan belanja jasa sebesar 53,82%, dan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 6,29% pada TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	1.500.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	30.675.000	30.341.000	1,10
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Jasa	16.000.000	34.650.000	(53,82)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	78.610.000	83.883.500	(6,29)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	125.285.000	150.374.500	(16,68)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	125.285.000	150.374.500	(16,68)

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2024 dan 2023.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2024 atau TA 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan 2023.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja modal lainnya pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2023 hal ini

disebabkan karena tidak ada belanja modal tahun 2024 dan 2023.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2023 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp0,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan

Mesin

Rp0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan

Bangunan

Rp0,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan, Jaringan

dan Irigasi

Rp0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap

Lainnya

Rp0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

*Aset Tak
Berwujud Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang

Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0,-*

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan tagihan yang sudah diinput dalam bentuk Surat Perintah Bayar namun belum selesai diproses hingga SP2D

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Pendapatan PNB
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNB pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai
Beban Pegawai
Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Beban Persediaan
Beban Persediaan
Rp0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp46.675.000,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.675.000,- dan Rp66.491.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	PENGEMBALIAN BELANJA	30-Jun-23
Beban Barang Operasional	-	-	-
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	-		1.500.000
Beban Bahan	30.675.000	-	30.341.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	16.000.000	-	34.650.000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19		-	-
JUMLAH	46.675.000	-	66.491.000

*Beban
Pemeliharaan
Rp0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp78.610.000,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp78.610.000,- dan Rp83.883.500,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	Pengembalian Belanja	TH 2023
Beban Perjalanan Biasa	66.200.000	-	59.133.500
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.410.000	-	24.750.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	78.610.000	-	83.883.500

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk deseraahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

Beban Lain-lain
Rp0,-

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2024.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Pos Luar Biasa
Rp0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp0,-

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- .

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

(Rp125.285.000),-

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp125.285.000),- dan Rp219.371.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas Rp Rp
Rp125.285.000,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp125.285.000,- dan Rp219.371.000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	125.285.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	125.285.000

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp125.285.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2024 dan 2023.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp0,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 653206489971000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648997
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-1247/WPB.12/KP.05/2020
Tanggal : 25-06-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W12.14.KU.03.03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

11/648997



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 11
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648997

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 07/07/24 12:41 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	249,259,000	125,285,000	(123,974,000)	50	219,371,000	150,374,500	68,996,500	69
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	249,259,000	125,285,000	(123,974,000)	50	219,371,000	150,374,500	68,996,500	69
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 11
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648997

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 07/07/24 12:41 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	249,259,000	125,285,000	(123,974,000)	50	219,371,000	150,374,500	68,996,500	69
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

null
null
null

Serang, 7 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 11
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648997
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/07/24 12:42 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 7/7/24 12:42 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	44,529,000	51,009,000	30,675,000	0	30,675,000	60.14	20,334,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	46,029,000	52,509,000	30,675,000	0	30,675,000	58.42	21,834,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	57,550,000	41,550,000	16,000,000	0	16,000,000	38.51	25,550,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	57,550,000	41,550,000	16,000,000	0	16,000,000	38.51	25,550,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107,770,000	117,290,000	66,200,000	0	66,200,000	56.44	51,090,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,910,000	37,910,000	12,410,000	0	12,410,000	32.74	25,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	145,680,000	155,200,000	78,610,000	0	78,610,000	50.65	76,590,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	249,259,000	249,259,000	125,285,000	0	125,285,000	50.26	123,974,000
	JUMLAH BELANJA	249,259,000	249,259,000	125,285,000	0	125,285,000	50.26	123,974,000

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 07/07/24 12:41 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	15,000,000	0	15,000,000	
JUMLAH ASET	15,000,000	0	15,000,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,000,000	0	15,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	15,000,000	0	15,000,000	

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,000,000	0	15,000,000	

Keterangan :
null
null
null

Serang, 7 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 07/07/24 12:42 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	15,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	125,285,000
3.0	521211	Beban Bahan	30,675,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	16,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	66,200,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,410,000	0
JUMLAH			140,285,000	140,285,000

Keterangan :
null
null
null

Serang, 7 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 11
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648997

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl. Cetak 07/07/2024 12:42 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 07/07/24 12:42 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	125,285,000
3.0	521211	Belanja Bahan	30,675,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	16,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,200,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,410,000	0
JUMLAH			125,285,000	125,285,000

Keterangan :
null
null
null

Serang, 7 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM

Tgl Cetak : 07/07/24 12:41 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	46,675,000	66,491,000	(19,816,000)	(29.803)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	78,610,000	83,883,500	(5,273,500)	(6.287)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM

Tgl Cetak : 07/07/24 12:41 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	125,285,000	150,374,500	(25,089,500)	(16.685)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(125,285,000)	(150,374,500)	25,089,500	(16.685)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(125,285,000)	(150,374,500)	25,089,500	(16.685)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(125,285,000)	(150,374,500)	25,089,500	(16.685)

Keterangan :

null
null
null

Serang, 7 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 07/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 07/07/24 12:41 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(125,285,000)	(150,374,500)	25,089,500	(16.68)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	125,285,000	150,374,500	(25,089,500)	(16.68)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
null
null
null

Serang, 7 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
dan BMN



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN 648990
(DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM/ 013.03)**

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03). Di samping itu, laporan keuangan *Unaudited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id,
Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.03) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.625.056,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.692.943.688,- atau mencapai 60, persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.838.178.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp111.869.500,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp111.869.500,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp11.869.500,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.695.071.663,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.695.071.663),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.695.071.663),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp17.187.931,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.695.071.663,-), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,-dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.689.753.232,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp11.869.500,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.625.056,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.692.943.688,-atau mencapai 59,63, persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.838.178.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp111.869.500,-yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp111.869.500,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp100.000.000,-dan Rp11.869.500,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.695.071.663,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.695.071.663),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.695.071.663),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp17.187.931,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.695.071.663,-), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.689.753.232,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp11.869.500,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 dan 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24		% thd Angg	30-Jun-23
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	8.625.056		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	8.625.056		-
BELANJA	B.1.				
Belanja Pegawai		-	-		-
Belanja Barang	B.1.1	2.838.178.000	1.692.943.688	59,65	1.291.590.280
Belanja Modal		-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
JUMLAH BELANJA		2.838.178.000	1.692.943.688	59,65	1.291.590.280

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) NERACA PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	31-Dec-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	100.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak	C2	-	8.625.056
Bagian Lancar TP/TGR	C3	-	(43.125)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Persediaan	C4	11.869.500	8.606.000
Persediaan yang belum diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		111.869.500	17.187.931
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin		-	-
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		-	-
Aset Lain-Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		111.869.500	17.187.931
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C5	100.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga		-	-
Utang yang belum ditagihkan		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		100.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		100.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C6	11.869.500	17.187.931
JUMLAH EKUITAS		11.869.500	17.187.931
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		111.869.500	17.187.931

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN
30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai		-	-
Beban Persediaan		2.171.100	
Beban Barang dan Jasa	D.1	836.398.000	836.398.000
Beban Pemeliharaan			
Beban Perjalanan Dinas	D.2	455.192.280	455.192.280
Beban Barang untuk Diserahkan kepada			
Beban Bantuan Sosial			
Beban Penyusutan dan Amortisasi			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
JUMLAH BEBAN		1.293.761.380	1.291.590.280
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.293.761.380)	(1.291.590.280)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.695.071.663)	(1.291.590.280)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.695.071.663)	(1.291.590.280)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN
30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai		-	-
Beban Persediaan		2.171.100	
Beban Barang dan Jasa	D.1	790.887.690	836.398.000
Beban Pemeliharaan			
Beban Perjalanan Dinas	D.2	902.055.998	455.192.280
Beban Barang untuk Diserahkan kepada			
Beban Bantuan Sosial			
Beban Penyusutan dan Amortisasi			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(43.125)	
JUMLAH BEBAN		1.695.071.663	1.291.590.280
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.695.071.663)	(1.291.590.280)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.695.071.663)	(1.291.590.280)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.695.071.663)	(1.291.590.280)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
EKUITAS AWAL	E.1	17.187.931	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.695.071.663)	(1.291.590.280)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2	1.689.753.232	1.291.590.280
EKUITAS AKHIR		11.869.500	-

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan**

A.PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1366);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 02 Juli 2024 Hal: Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2024.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)

Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah,

- pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
 5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
 3. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara lain :

1. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hokum dan layanan jasa hokum Kementerian Hukum dan HAM
3. Efektifitas peneyelenggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten kota

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03)

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

- **Pendapatan- LRA**

LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

• Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

○ Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing- masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup:
 - barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai dan barang tak habis pakai;
 - bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, contohnya bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat;
 - barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan operasional.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

- **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
 - Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.
 - Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai

Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa :

Aset Tetap:

- a. Tanah,
- b. Gedung dan bangunan, dan
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:
 - 1) Jalan dan Jembatan
 - 2) Bangunan Air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2018 tanggal 14 September 2018 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan

setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

a. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat

	(tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

• **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) sudah mengadakan 5 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) antara lain:

1. Revisi Dipa ke 1 Tanggal : 19 Maret 2024 tentang revisi halaman 3 Dipa ;
2. Revisi Dipa ke 2 Tanggal : 12 April 2024 tentang tentang revisi kegiatan Publikasi Media Online ;
3. Revisi Dipa ke 3 Tanggal : 22 Mei 2024 tentang revisi kegiatan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
4. Revisi Dipa ke 4 Tanggal : 24 Juni 2024 tentang perubahan kegiatan sosialisasi layanan ahu;
5. Revisi Dipa ke 5 Tanggal : 04 Juli 2024 tentang revisi hal 3 Dipa ;

Hal ini disebabkan oleh adanya adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan anggaran.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.838.178.000	2.838.178.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.838.178.000	2.838.178.000

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp8.625.056,-

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp8.625.056,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kanwil Kemenkumham Banten (648990) yang terdapat pada laporan keuangan sebesar Rp8.625.056,-. Adapun Realisasi Pendapatan Kanwil Kemenkumham Banten 648990 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni
2022*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan PNBPN Lainnya	-	8.625.056	-
Jumlah	-	8.625.056	-

Pendapatan PNBPN Lainnya Kanwil Kemenkumham Banten 648999 per 30 Juni 2024 merupakan temuan BPK RI Tahun Anggaran 2023 terkait kelebihan pembayaran Helpdesk AHU Tahun 2023 sebesar Rp8.625.056,- dan sudah disetorkan ke kas negara pada tanggal 08 Maret 2024 dengan nomor NTB : 240308717783 dan NTPN : 7D8662G4VPESBPA2 dengan kode akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu).

Realisasi
Belanja
Negara
Rp1.692.943.688,-

B.1 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.692.943.688,- atau 59.65% dari anggaran belanja sebesar Rp2.838.178.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	30-Jun-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.838.178.000	1.692.943.688	59,65
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	2.838.178.000	1.692.943.688	59,65
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.838.178.000	1.692.943.688	59,65

Perbandingan Realisasi Belanja

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.692.943.688	1.291.590.280	31,07
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.692.943.688	1.291.590.280	31,07

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Belanja Negara Per Juni 2024 sebesar Rp1.692.943.688 dan dibandingkan dengan realisasi per 30 Juni 2023 realisasi belanja negara per Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 31,07 % kenaikan ini disebabkan karena tahun 2024 sudah dicabutnya status pandemi menjadi endemi sehigga situasi sudah mulai normal, kegiatan yang mengumpulkan orang banyak sudah diperbolehkan, perjalanan dinas sudah tidak dibatasi.

Belanja**B.1.1. Belanja Barang****Barang****Rp1.291.590.2****80,-**

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.291.590.280,- dan Rp1.291.590.280,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan 31.07% dari Realisasi Belanja Barang TA 30 Juni 2023. Hal ini antara lain disebabkan karena telah dicabutnya status pandemi menjadi endemi yang berdampak tidak adanya pembatasan pada beberapa kegiatan yang terdampak pandemi Covid seperti belanja perjalanan dinas sehingga hal ini berdampak meningkatnya belanja barang non operasional lainnya yaitu belanja bahan bakar kendaraan operasional seperti tahun 2023 dan belanja paket Meeting dalam dan luar kota dan disebabkan karena adanya penambahan kegiatan mendukung tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten.

**Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2024
dan 30 Juni 2023**

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi	0	0	#DIV/0!
Belanja Bahan	221.530.000	165.708.000	33,69
Belanja Honor Output kegiatan	355.300.000	362.400.000	(1,96)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pand	0	33.000.000	(100,00)
Belanja Langganan Daya Jasa lainnya			#DIV/0!
Belanja Jasa Pos dan Giro			#DIV/0!
Belanja Sewa	84.450.000	-	#DIV/0!
Belanja Jasa Profesi	28.300.000	25.790.000	9,73
Belanja Jasa Lainnya	101.307.690	249.500.000	(59,40)
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Biasa	115.646.500	81.302.280	42,24
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.430.000	121.050.000	(98,82)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	244.423.000	48.350.000	405,53
Belanja Perjalanna Dinas Paket Meeting luar kota	540.556.498	204.490.000	164,34
Belanja Barang Persediaan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor			-
Pengembalian Belanja			-
Jumlah Belanja	1.692.943.688	1.291.590.280	31,07

Pada tahun 2024 tidak terdapat belanja penanganan covid tetapi ada belanja sewa sebesar Rp 84.450.000,- ini merupakan belanja sewa billboard dari kegiatan publikasi dan pameran yang merupakan sosialisasi layanan AHU.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp100.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	30-Jun-24	31-Dec-23
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	100.000.000	-
Jumlah	100.000.000	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp.0,-*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 2023 dan masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp8.625.056,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024

Piutang Bukan Pajak	JUMLAH
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-
Piutang Lainnya	-
Jumlah	-

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak Rp0,-*

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp(43.125) Merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Persediaan
Rp11.869.500,
-*

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.869.500,- dan Rp8.606.000,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	2024	2023	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	11.869.500	8.606.000	37,92
Barang untuk Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Bahan Baku	-	-	-
Jumlah	11.869.500	8.606.000	37,92

Pada Kanwil Kumham Banten 648990 Barang Konsumsinya berupa :

*Rincian Baraang Konsumsi
Semester I TA 2024 dan 2023*

Jenis	2024	2023	Naik (Turun) %
Barang Cetak	2.275.000		#DIV/0!
Berbagai Kertas	1.190.000	8.606.000	(86,17)
Tinta / Toner Printer	703.500		
Apostile	5.856.000		
Label Legalisasi	1.845.000		
			-
Jumlah	11.869.500	8.606.000	37,92

*Uang Muka
dari KPPN
Rp100.000.000,
-*

C.5 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan. Saldo Uang Muka Di KPPN mencerminkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran.

Ekuitas

Rp11.869.500,-

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.869.500,- dan Rp17.187.931,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban

Persediaan

Rp2.171.100,-

D.1 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.171.100,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang

dan Jasa

Rp790.887.690,-

-

D.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp790.887.690,- dan Rp836.398.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan

30 Juni 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	Pengembalian Belanja	30-Jun-23	Naik / Turun (%)
521131	Beban Barang Operasional- Penanganan F	0		0	-
521211	Beban Bahan	221.530.000,		165.708.000	33,69
521213	Beban Honor Output Kegiatan	355.300.000,		362.400.000	(1,96)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0		0	-
521241	Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	0		33.000.000	(100,00)
522141	Beban Sewa	84.450.000,		0	#DIV/0!
522151	Beban Jasa Profesi	28.300.000,		25.790.000	9,73
522191	Beban Jasa Lainnya	101.307.690,		249.500.000	(59,40)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid	0		0	100,00
593111	Beban Persediaan Konsumsi	0		0	100,00
	Jumlah	790.887.690	0	836.398.000	(5,44)

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,44% dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Ada beberapa Kegiatan yang baru akan dilaksanakan di semester II Tahun Anggaran 2024
2. Ada beberapa kegiatan yang sedang proses revisi untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada.

tidak terdapat selisih antara belanja barang dan jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa pada LO.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp902.055.998,
-*

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp902.055.998,- dan Rp455.192.998,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan
30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	Pengembalian Belanja	30-Jun-23
Beban Perjalanan Biasa	115.646.500	0	81.302.280
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.430.000	0	121.050.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	244.423.000	0	48.350.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	540.556.498	0	204.490.000
Jumlah	902.055.998	0	455.192.280

Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan di Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota maupun luarkota hal ini disebabkan oleh sudah tidak adanya pembatasan perjalanan dan kegiatan yang melibatkan / mengumpulkan orang sudah diperbolehkan dan ada beberapa kegiatan – kegiatan yang tertunda pada saat pandemi baru bisa dilaksanakan saat ini.

tidak terdapat selisih antara belanja perjalanan dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas pada LO.

D.4 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(43.125,-)*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(43.125,-) dan Rp0,-.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp17.187.931,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.187.931,- dan Rp0,-.

Defisit LO

(Rp1.695.071.663,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar (1695.071.663,-) dan Rp(Rp1.291.590.280,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Tetap Non
Revaluasi Rp0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
per 30 Juni 2024*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

Transaksi

Antar Entitas

Rp1.689.753.232,

-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.689.753.232,- dan Rp1.291.590.280,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(8.625.056)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.692.943.688
Transfer Masuk	21.737.725
Transfer Keluar	(16.303.125)
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	1.689.753.232

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar (Rp8.625.056) sedangkan DKEL sebesar Rp1.692.943.668,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp21.737.725,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	-	-	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp16.303.125.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			
2			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
Rp11.869.500,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.869.500,- dan Rp0,- .



LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

- A. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (Jika Ada)
- B. REKENING YANG DIGUNAKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
- Nomor Rekening : 650896489901000
- Nama Rekening : BPG020 KNWL HUKUM DAN HAM BANTEN
648990
- Nama Bank : BRI CABANG SERANG
- Surat Izin : S-1063/WPB.12/KP.05/2020
- Tanggal : 08 Juni 2021
- C. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-14 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2024, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 :

KPA : Dodot Adikoeswanto

PPK : Emiel Amarulla

dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-01 Tahun 2024 pada tanggal 01 Januari 2024 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran :
Bendahara : Hafin Jaya Wardana

- D. Realisasi Anggaran periode Januari s.d Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar 59.65%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut (*diisi dengan pelaksanaan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap realisasi*):

No.	Nama Kegiatan	Realisasi (%)
1	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	78.00 %
2	Penanganan perkara pada kantor wilayah	75.00 %

3	Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	80.00 %

Tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2024 ini

E. Capaian Nilai IKPA berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN):

Pada bulan Juni 2023 nilai IKPA Kanwil Banten 648990 sebesar 100 %.

F. Per Juni 2024, nilai indikator kinerja detail capaian RO Kanwil Kumham Banten 648990 sebagai berikut :

NO	Klasifikasi Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Target PCRO	Persentase Capaian RO	Realisasi Volume RO	Progres Capaian RO
1	5251. BAH. Pekayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4	50%	4	78%
2	5251. BCB. Perkara Hukum Lembaga	001 - Penanganan perkara pada kantor wilayah	1	50%	1	78%
3	5251. BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	8	50%	8	80%

G. Pada tahun 2024 terdapat Terdapat Temuan BPK RI untuk belanja barang Tahun Anggaran 2023 yaitu kelebihan pembayaran belanja barang jasa helpdesk sebesar Rp8.625.056,- dan sudah disetorkan ke kas negara pada tanggal 08 Maret 2024 dengan nomor NTB : 240308717783 dan NTPN : 7D8662G4VPESBPA2 dengan kode akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu).



LAPORAN KEUANGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (10/648996)

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 30 JUNI 2024**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL.KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.190.823.792,- atau mencapai 49.74 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.393.966.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.000.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp20.000.000,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.000.000,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp20.000.000,- dan Rp2.000.000,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.190.823.792,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.190.823.792,- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.190.823.792,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.190.823.792,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.192.823.792,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp2.000.000,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.10) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	2.393.966.000	1.190.823.792	49,74	1.402.925.000
Belanja Modal	B.5	2.000.000	-		
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		2.395.966.000	1.190.823.792	49,70	1.402.925.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.10)
NERACA**

PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		20.000.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	2.000.000	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		2.000.000	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		22.000.000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	20.000.000	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		20.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	2.000.000	-
JUMLAH EKUITAS		2.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.10)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN
30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.077.529.000	1.257.073.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	113.294.792	145.852.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.190.823.792	1.402.925.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.190.823.792)	(1.402.925.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.190.823.792)	(1.402.925.000)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.190.823.792)	(1.402.925.000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.10)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI
2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.190.823.792)	(1.402.925.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.192.823.792	1.402.925.000
EKUITAS AKHIR	E.5	2.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.10) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan yang cukup besar dalam dua lingkup yakni tahap pra legislasi dan pasca legislasi. Perencanaan hukum dilakukan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
2. Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
3. Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

• Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal

neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang

d. Piutang Jangka Panjang

Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat

	(tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10)* melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.10.2.648996/2024 tanggal 28 November 2024. Satker 648996 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 terdapat revisi, sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648996 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.393.966.000	2.393.966.000
Belanja Modal	2.000.000	2.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	2.395.966.000	2.395.966.000

Realisasi

Pendapatan

Rp0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.10).

Realisasi

Belanja

Negara

Rp1.192.823.792,-

,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.192.823.792,- atau 49,78% dari anggaran belanja sebesar Rp 2.395.966.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.393.966.000	1.190.823.792	49,74
Belanja Modal	2.000.000	2.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	2.395.966.000	1.192.823.792	49,78
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.395.966.000	1.192.823.792	49,78

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 14,98% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.190.823.792	1.402.925.000	(15,12)
Belanja Modal	2.000.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.192.823.792	1.402.925.000	(14,98)

*Belanja
Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2024 atau TA 2023.

*Belanja
Barang
Rp1.190.823.792,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.190.823.792,- dan

Rp1.402.925.000,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 15,12% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	62.949.000	44.353.000	41,93
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Jasa	1.014.580.000	1.212.720.000	(16,34)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	113.294.792	145.852.000	(22,32)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.190.823.792	1.402.925.000	(15,12)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.190.823.792	1.402.925.000	(15,12)

Pada Kantor Wilayah Banten DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Program Prioritas Nasional (PN) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja jasa konsultan (522131) yaitu Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) serta Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah. Realisasi Bantuan Hukum periode 30 Juni 2024 sebesar Rp 1.041.818.522 atau 54,08% dari Anggaran sebesar Rp1.926.264.000 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG
4841.QBA	Layanan Bantuan	1.576.000.000	945.400.000	59,99
4841.QBC	Layanan Bantuan	245.410.000	65.580.000	26,72
4841.PDE	Kegiatan Verifikasi dan	104.854.000	30.838.522	29,41
Jumlah		1.926.264.000	1.041.818.522	54,08

*Belanja
Modal Rp 0,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Kanwil Banten pada TA 2024 Ada.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2024 mengalami kenaikan dibandingkan 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena terdapat belanja modal pada TA 2024.

*Belanja
Modal Tanah
Rp 0,-*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2023 atau TA 2022.

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp 0,-*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan 2023.

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp 0,-*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024.

*Belanja
Modal Jalan,*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 30

Irigasi dan Jaringan Rp 0,- Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2024.

Belanja Modal Lainnya Rp 2.000.000,- **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**
Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000,- dan Rp0,-. Belanja modal Kanwil Banten pada TA 2024 ada.
Realisasi Belanja modal lainnya pada 30 Juni 2024 mengalami kenaikan dibandingkan 30 Juni 2023, hal ini disebabkan karena ada belanja modal di TA 2024.

Belanja Bantuan Sosial Rp 0,- **B.6 Belanja Bantuan Sosial**
Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2024 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp20.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

Kas Lainnya

dan Setara Kas

Rp0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

C.14 Tanah

Rp0,- Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan **C.15 Peralatan dan Mesin**

Mesin
Rp0,- Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan **C.16 Gedung dan Bangunan**

Bangunan
Rp0,- Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan, Jaringan **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

dan Irigasi
Rp0,- Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Lainnya
Rp0,- Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp2.000.000,- dan Rp0,-. terdapat pembelian Aset tetap Lainnya pada TA 2024 ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

*Aset Tak
Berwujud Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang

Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp20.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.25 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada *Rincian Beban Pegawai* 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan.

Beban Barang dan
Jasa
Rp2.126.970.000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.077.529.000,- dan Rp 1.257.073.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2023
Beban Barang Operasional	-	-	-
Beban Bahan	62.949.000	-	44.353.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	1.010.980.000	-	1.205.020.000
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	3.600.000	-	7.700.000
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
JUMLAH	1.077.529.000	-	1.257.073.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa		1.077.529.000	

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban
Pemeliharaan
Rp0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja

Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp375.711.000,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp113.294.792,- dan Rp145.852.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	PENGEMBA LIAN	TH 2023
Beban Perjalanan Biasa	86.494.792		124.952.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.800.000	-	20.900.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	113.294.792	-	145.852.000

Beban perjalanan Biasa (524111) merupakan perjalanan dinas ke 8 Kabupaten dan Kota di seluruh Wilayah Banten.

Beban Perjalanan Dinas Dalam kota (524113) merupakan perjalanan dalam kota untuk kegiatan dan monev bantuan hukum.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-

Rp0,-

masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada

saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2022.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Defisit LO

Rp1.190.823.792,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.190.823.792,- dan Rp1.402.925.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp1.192.823.792,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.192.823.792,- dan Rp1.402.925.000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	-

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp.0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,- dari

total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2022. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2023 dan 2022.

Ekuitas Akhir

Rp20.000.000,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000,- dan Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 653576489961000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648996
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-1214/WPB.12/KP.05/2021
Tanggal : 23-07-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12-69.KU.03.03 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2024, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana

F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN

Di TA 2024 ini tidak terdapat temuan.



LAMPIRAN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
648996

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Tgl, No. SP : 28 November 2023 , DIPA-013.10.2.648996/2024

Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (29.51) BANTEN / KOTA TANGERANG KPPN : (020) Serang

Satuan Kerja : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 20.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00020/DRPP/648996/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	20.000.000,00	19.098.000,00	19.098.000,00	20.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	20.000.000,00	19.098.000,00	19.098.000,00	20.000.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	20.000.000,00	19.098.000,00	19.098.000,00	20.000.000,00
	1. BP UP*)	20.000.000,00	19.098.000,00	19.098.000,00	20.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	20.000.000,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	20.000.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	20.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	20.000.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	20.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


DODOT ADIKOESWANTO
NIP 197110211994031001

KOTA TANGERANG, Juni 2024

Bendahara Pengeluaran


HAFIN JAYA WARDANA
NIP 199609012020121001

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653576489961000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 20.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00020/DRPP/648996/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	20.000.000
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	20.000.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	20.000.000
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	20.000.000

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	20.000.000
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	20.000.000

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	20.000.000
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	20.000.000
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	20.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	20.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	20.000.000

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



HAFIN JAYA WARDANA
NIP 199609012020121001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



DODOT ADIKOESWANTO
NIP 197110211994031001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 648996

BULAN : JUNI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	653576489961000	BPG 020 KNWL HUKUM DAN HAM BANTEN 648996	Bank BRI Kantor Pusat	20	S-1214/WPB.12/KP.05/2021	23-07-2020	2024-06-27	20,000,000.00

BENDAHARA PENGELUARAN



HAFIN JAYA WARDANA

NIP 199609012020121001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (29.51) BANTEN / KOTA TANGERANG

Satuan Kerja : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN64899600-

No Rekening : 653576489961000

Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN HAM BANTEN 648996

Nama Bank : Bank BRI Kantor Pusat

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			20.000.000,00
26-06-2024	00067/KW/648996/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota - Transport Lokal	0,00	9.300.000,00	10.700.000,00
26-06-2024	00065/KW/648996/2024	Belanja Bahan- Biaya Pembelian Seminar	0,00	3.410.000,00	7.290.000,00
26-06-2024	00064/KW/648996/2024	Belanja Bahan - Biaya Konsumsi Makan Rapat	0,00	3.348.000,00	3.942.000,00
26-06-2024	00066/KW/648996/2024	Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	2.142.000,00
26-06-2024	00063/KW/648996/2024	Belanja Bahan - Biaya Kosumsi Snack Rapat	0,00	1.240.000,00	902.000,00
27-06-2024	FPK-PENG-g2nUhPMrf2U8Myh	Terima SP2D	19.098.000,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah			19.098.000,00	19.098.000,00	20.000.000,00


BENDAHARA PENGELUARAN
HAFIN JAYA WARDANA
NIP 199609012020121001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-06

Kode Satker : 648996

Kode KPPN : 020

Nama Satker : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM PROPINSI BANTEN

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SERANG

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.20,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.20,000,000.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.20,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.20,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 02 Juli 2024



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN (648996)

Cetak Tanggal 02-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609012020121001 pada 02-07-
2024 13:25:53 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN (648996)

Cetak Tanggal 02-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609012020121001 pada 02-07-
2024 13:25:53 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN (648996)

Cetak Tanggal 02-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



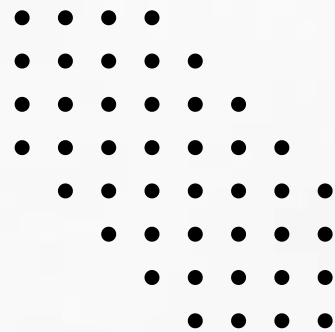
Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609012020121001 pada 02-07-
2024 13:25:53 WIB.



LAPORAN KEUANGAN

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM BANTEN 07/648993**

UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL.KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP197110211994031001

Laporan Keuangan Semester I KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.07) Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.441.148.656 atau mencapai 61% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.374.578,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp45.000.000,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp45.000.000,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.441.148.656,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai (Rp1.441.148.656,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.441.148.656,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.441.148.656,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.441.148.656,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% Thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	2.374.578.000	1.441.148.656	60,69	974.132.699
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.374.578.000	1.441.148.656	60,69	974.132.699

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07)

NERACA

PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	45.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		45.000.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		45.000.000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	45.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		45.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		45.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		45.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	594.752.756	307.210.500
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	846.395.900	666.922.199
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.441.148.656	974.132.699
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.441.148.656)	(974.132.699)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.441.148.656)	(974.132.699)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.441.148.656)	(974.132.699)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.441.148.656)	(974.132.699)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.441.148.656	974.132.699
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) berkedudukan di Serang-Banten. Rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten antara lain:

1. Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan menengah, serta masyarakat secara umum.
2. Penerapan sistem *Industrial Property Automation System* (IPAS) untuk penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual hingga penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan serta percepatan penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual secara efektif dan efisien.

3. Penyelesaian pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebanyak 30 IG terdaftar sebagai wujud perlindungan terhadap potensi kekayaan alam di seluruh wilayah Indonesia.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

- **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional

antara nilai dan periode waktu sewa.

3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013. 07) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- 013.07.2.648993/2024 tanggal 24 November 2023. Satker 648993 belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun rincian DIPA tersebut :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.374.578.000	2.374.578.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.374.578.000	2.374.578.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp0,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,- atau mencapai 0,- persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07).

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp1.441.148.656,-*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.441.148.656,- atau 60,69% dari anggaran belanja sebesar Rp2.374.578.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.374.578.000	1.441.148.656	60,69
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	2.374.578.000	1.441.148.656	60,69
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.374.578.000	1.441.148.656	60,69

Dibandingkan dengan 30 Juni 2023, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 47,94% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.441.148.656	974.132.699	47,94
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.441.148.656	974.132.699	47,94

*Belanja
Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Realisasi belanja pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Belanja

Barang

Rp1.441.148.656,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.441.148.656,- dan Rp974.132.699,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 47,94% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan realisasi Belanja Barang Non Operasional 157,36%, Belanja Jasa Sebesar 73,84% dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar 26,91% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	187.072.000	72.690.000	157,36
Belanja Jasa	407.680.756	234.520.500	73,84
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	846.395.900	666.922.199	26,91
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.441.148.656	974.132.699	47,94
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.441.148.656	974.132.699	47,94

Belanja

Modal Rp0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada per 30 Juni 2024.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tidak terdapat realisasi per 30 Juni 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per 30 Juni 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial per 30 Juni 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp45.000.000,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45.000.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Tidak terdapat Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada saat tanggal pelaporan.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo di Bendahara Penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi

kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak **C.4 Piutang Bukan Pajak**

Pajak

Rp0,-

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR

Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

Bagian Lancar

TPA

Rp0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Jangka

Pendek

Rp0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

Belanja

Dibayar di

Muka Rp0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena

kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran –
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp0,-*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

*Peralatan dan
Mesin
Rp 0,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Peralatan dan Mesin pada saat

tanggal pelaporan.

*Gedung dan
Bangunan
Rp0,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp0,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak terdapat Aset tetap lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset pada saat tanggal pelaporan.

*Aset Tak
Berwujud
Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) tidak mempunyai aset tak berwujud pada saat tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni

Rp0,-

2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN*

Rp45.000.000,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp45.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga pada saat tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-*

C. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNB pada saat tanggal pelaporan.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp0,-

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp594.752.756,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp594.752.756,- dan Rp307.210.500,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	PENGEMBALI AN BELANJA	TH 2023
Beban Bahan	187.072.000		72.690.000
Beban Penanganan Pandemi Covid 19	-		
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	
Beban Jasa Lainnya	291.860.756	-	221.170.500
Beban Sewa	105.020.000		-
Beban Barang Non Operasional lainnya	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Beban Jasa Profesi	10.800.000	-	13.350.000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
JUMLAH	594.752.756	0	307.210.500

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban
Pemeliharaan Rp0,-
,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Tidak terdapat Beban Pemeliharaan pada

saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp846.395.900,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp846.395.900,- dan Rp666.922.199,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Th 2024	Pengembalian Belanja	Th 2023
Beban Perjalanan Biasa	186.339.900	-	140.314.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	660.056.000	-	526.608.199
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	846.395.900	-	666.922.199

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang

untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2023.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,- **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Defisit LO (Rp1.441.148.656,-) **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar (Rp1.441.148.656,-) dan (Rp974,132,699,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,- **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,- **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp1.441.148.656,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.441.148.656,- dan Rp974.132.699,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.441.148.656
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1.441.148.656

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

DKEL

Rp1.441.148.656,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp1.441.148.656,-.

Transfer

Masuk/ Keluar

Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Tidak terdapat Transfer Masuk / keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Pengesahan dan Pengembalian

Hibah Langsung

Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun

2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0,-.

Tidak terdapat pengesahan Hibah sampai dengan tanggal pelaporan.

Ekuitas Akhir

Rp0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 . PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 650476489931000

Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN HAM
BANTEN 648993

Nama Bank : BRI KC Serang

Surat Izin : S-829/WPB.12/KP.05/2020

Tanggal : 08-05-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12.411.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto

PPK : Emiel Amarulla

Bendahara : Hafin Jaya Wardana

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 . PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 650476489931000

Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN HAM
BANTEN 648993

Nama Bank : BRI KC Serang

Surat Izin : S-829/WPB.12/KP.05/2020

Tanggal : 08-05-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12.411.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto

PPK : Emiel Amarulla

Bendahara : Hafin Jaya Wardana



**KANWI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(07/648993)**

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 6:30 AM

Tgl Cetak : 04/07/24 1:35 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	594,752,756	307,210,500	287,542,256	93.598
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	846,395,900	666,922,199	179,473,701	26.911
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 6:30 AM

Tgl Cetak : 04/07/24 1:35 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,441,148,656	974,132,699	467,015,957	47.942
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,441,148,656)	(974,132,699)	(467,015,957)	47.942
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,441,148,656)	(974,132,699)	(467,015,957)	47.942
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,441,148,656)	(974,132,699)	(467,015,957)	47.942

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DODOT ADIKOESWANTO

197110211994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:21 PM

Tgl Cetak : 04/07/24 1:38 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,441,148,656)	(974,132,699)	(467,015,957)	47.94
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,441,148,656	974,132,699	467,015,957	47.94
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DODOT ADIKOESWANTO

197110211994031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 07
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648993

Tgl Data : 04/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 04/07/24 10:38 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,374,578,000	1,441,148,656	(933,429,344)	61	1,730,303,000	974,132,699	756,170,301	56
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,374,578,000	1,441,148,656	(933,429,344)	61	1,730,303,000	974,132,699	756,170,301	56
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 07
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648993

Tgl Data : 04/07/24 6:30 AM
Tgl Cetak : 04/07/24 10:38 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,374,578,000	1,441,148,656	(933,429,344)	61	1,730,303,000	974,132,699	756,170,301	56
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
 BELUM FINAL
 *) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
 197110211994031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:21 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:42 PM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	45,000,000	0	45,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	45,000,000	0	45,000,000	
JUMLAH ASET	45,000,000	0	45,000,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	45,000,000	0	45,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45,000,000	0	45,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	45,000,000	0	45,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	45,000,000	0	45,000,000	

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:11 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:43 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	45,000,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	45,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,441,148,656
3.0	521211	Beban Bahan	187,072,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	105,020,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	291,860,756	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	186,339,900	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	660,056,000	0
JUMLAH			1,486,148,656	1,486,148,656

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 04/07/24 1:21 PM
Tgl Cetak : 04/07/24 3:43 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,441,148,656
3.0	521211	Belanja Bahan	187,072,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	105,020,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	291,860,756	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186,339,900	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	660,056,000	0
JUMLAH			1,441,148,656	1,441,148,656

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 4 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 013
: 07
: 2900
: 648993
: KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/07/24 3:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/7/24 1:23 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	440,878,000	425,982,000	187,072,000	0	187,072,000	43.92	238,910,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	440,878,000	425,982,000	187,072,000	0	187,072,000	43.92	238,910,000
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	200,500,000	116,020,000	105,020,000	0	105,020,000	90.52	11,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	41,400,000	27,000,000	10,800,000	0	10,800,000	40	16,200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000,000	419,676,000	291,860,756	0	291,860,756	69.54	127,815,244
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	541,900,000	562,696,000	407,680,756	0	407,680,756	72.45	155,015,244
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	485,150,000	485,150,000	186,339,900	0	186,339,900	38.41	298,810,100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,150,000	9,150,000	0	0	0	0	9,150,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	897,500,000	891,600,000	660,056,000	0	660,056,000	74.03	231,544,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,391,800,000	1,385,900,000	846,395,900	0	846,395,900	61.07	539,504,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,374,578,000	2,374,578,000	1,441,148,656	0	1,441,148,656	60.69	933,429,344
	JUMLAH BELANJA	2,374,578,000	2,374,578,000	1,441,148,656	0	1,441,148,656	60.69	933,429,344

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648993

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl. Cetak 04/07/2024 3:44 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

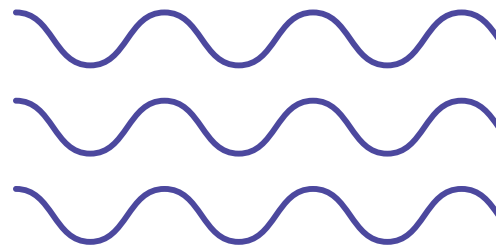
KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5



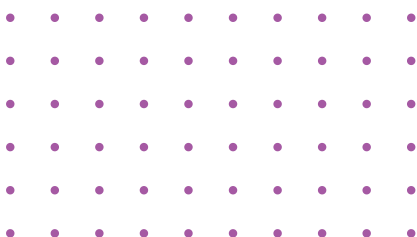
LAPORAN KEUANGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

(09/648995)



UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2024
Kepala Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL.KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Trwilulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp126.668.000,- atau mencapai 50% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp251.447.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2024. Nilai Aset per per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.000.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah

sebesar Rp126.668.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp235.483.350,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp126.668.000,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp126.668.000,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp126.668.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.09) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% Thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	251.447.000	126.668.000	50,38	146.249.350
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		251.447.000	126.668.000	50,38	146.249.350

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.09)
NERACA

PER 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	15.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		15.000.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		15.000.000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	15.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		15.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.09)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI
2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	48.258.000	62.570.350
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	78.410.000	83.679.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		126.668.000	146.249.350
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(126.668.000)	(146.249.350)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(126.668.000)	(146.249.350)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(126.668.000)	(146.249.350)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN****(013.09)****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 31****DESEMBER 2023***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(126.668.000)	235.483.350
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	126.668.000	(235.483.350)
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.09) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu dalam tahapan legislasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

• **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.09.2.648995/2024 tanggal 24 November 2023. Satker 648995 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648995 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	251.447.000	251.447.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	251.447.000	251.447.000

Realisasi

Pendapatan

Rp0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.09).

Realisasi

Belanja

Negara

Rp126.668.000,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp126.668.000,- atau 50,38% dari anggaran belanja sebesar Rp251.447000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	251.447.000	126.668.000	50,38
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	251.447.000	126.668.000	50,38
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	251.447.000	126.668.000	50,38

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 13,39% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh naiknya besaran anggaran pada DIPA 648995 dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	126.668.000	146.249.350	(13,39)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	126.668.000	146.249.350	(13,39)

*Belanja
Pegawai
Rp0,-,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2024 atau TA 2023.

Belanja

Barang

Rp235.483.350,

-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 126.668.000,- dan Rp146.249.350,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 13,39% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan belanja barang non operasional sebesar 17,67%, belanja jasa sebesar 43,31%, dan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 6,30% pada TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	41.058.000	49.870.350	(17,67)
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Jasa	7.200.000	12.700.000	(43,31)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	78.410.000	83.679.000	(6,30)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	126.668.000	146.249.350	(13,39)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	126.668.000	146.249.350	(13,39)

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2024 dan 2023.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2024 atau TA 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan 2023

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2024.

*Belanja
Modal Rp 0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Realisasi Belanja modal lainnya pada 30 Juni 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 30 Juni 2023 hal ini disebabkan karena tidak ada belanja

modal tahun 2024 dan 2023.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2024 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp15.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,-. dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-,-*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0,-,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang
Rp0,-

Panjang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp0,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan Mesin
Rp0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan Bangunan
Rp0,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Lainnya
Rp0,-,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,-,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

*Aset Tak
Berwujud Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

Aset Lain-Lain

Rp0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN*

Rp15.000.000,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) per tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,-, dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNPB pada saat tanggal pelaporan.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada *Rincian Beban Pegawai* 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

*Beban Barang dan
Jasa
Rp48.258.000,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp48.258.000,- dan Rp62.570.350,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2023
Beban Barang Operasional	-	-	-
Beban Bahan	41.058.000	-	49.870.350
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Penanganar	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	7.200.000	-	12.700.000
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
JUMLAH	48.258.000	-	62.570.350

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban
Pemeliharaan Rp0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp78.410.000,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp78.410.000,- dan Rp83.679.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	Pengembalian Belanja	TH 2023
Beban Perjalanan Biasa	42.860.000		45.729.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.550.000	-	37.950.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	78.410.000	-	83.679.000

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan

piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2024.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- .

Defisit LO

(Rp126.668.000,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.668.000,- dan Rp235.483.350,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp126.668.000,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp126.668.000,- dan Rp235.483.350,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	126.668.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	126.668.000

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

DKEL Rp

Rp126.668.000,-,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp0,-, sedangkan DKEL sebesar Rp126.668.000,-.

Transfer

Masuk/Keluar

Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-.

Pengesahan/

Pengembalian

Hibah Langsung

Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-. dari

total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2022. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2024 dan 2023.

Ekuitas Akhir

Rp0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 653986489951000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648995
Nama Bank : BRI Kantor Pusat
Surat Izin : S-1353/WPB.12/KP.05/2021
Tanggal : 06-07-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12-69.KU.03.03 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2024, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana



**KANWIL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN
(09/648995)**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ASASI MANUSIA 09
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648995

Tgl Data : 05/07/24 12:52 PM
Tgl Cetak : 05/07/24 9:54 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	251,447,000	126,668,000	(124,779,000)	50	235,484,000	146,249,350	89,234,650	62
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	251,447,000	126,668,000	(124,779,000)	50	235,484,000	146,249,350	89,234,650	62
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ASASI MANUSIA 09
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648995

Tgl Data : 05/07/24 12:52 PM
Tgl Cetak : 05/07/24 9:54 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	251,447,000	126,668,000	(124,779,000)	50	235,484,000	146,249,350	89,234,650	62
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
 BELUM FINAL
 *) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 5 Juli 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

 DODOT ADIKOESWANTO
 197110211994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648995
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/07/24 9:54 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/7/24 9:47 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	62,427,000	64,077,000	41,058,000	0	41,058,000	64.08	23,019,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	62,427,000	64,077,000	41,058,000	0	41,058,000	64.08	23,019,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	16,200,000	16,200,000	7,200,000	0	7,200,000	44.44	9,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	16,200,000	16,200,000	7,200,000	0	7,200,000	44.44	9,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,520,000	91,520,000	42,860,000	0	42,860,000	46.83	48,660,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,300,000	79,650,000	35,550,000	0	35,550,000	44.63	44,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	172,820,000	171,170,000	78,410,000	0	78,410,000	45.81	92,760,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	251,447,000	251,447,000	126,668,000	0	126,668,000	50.38	124,779,000
	JUMLAH BELANJA	251,447,000	251,447,000	126,668,000	0	126,668,000	50.38	124,779,000

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 06/07/24 12:34 PM
Tgl Cetak : 06/07/24 1:55 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	15,000,000	0	15,000,000	
JUMLAH ASET	15,000,000	0	15,000,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,000,000	0	15,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	15,000,000	0	15,000,000	

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,000,000	0	15,000,000	

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 6 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)

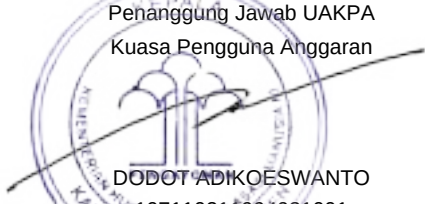


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 05/07/24 12:29 PM
Tgl Cetak : 05/07/24 9:54 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	126,668,000
3.0	521211	Belanja Bahan	41,058,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,860,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,550,000	0
JUMLAH			126,668,000	126,668,000

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 5 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 05/07/24 12:29 PM
Tgl Cetak : 05/07/24 9:53 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(126,668,000)	(146,249,350)	19,581,350	(13.39)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	126,668,000	146,249,350	(19,581,350)	(13.39)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 5 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 2900

SATUAN KERJA : 648995

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN HAK ASASI MANUSIA

BANTEN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl. Cetak 05/07/2024 9:54 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 05/07/24 12:52 PM

Tgl Cetak : 05/07/24 9:54 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	15,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	126,668,000
3.0	521211	Beban Bahan	41,058,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42,860,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,550,000	0
JUMLAH			141,668,000	141,668,000

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Serang, 5 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DODOT ADIKOESWANTO

197110211994031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 06/07/24 6:33 AM

Tgl Cetak : 06/07/24 12:30 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	48,258,000	62,570,350	(14,312,350)	(22.874)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	78,410,000	83,679,000	(5,269,000)	(6.297)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 06/07/24 6:33 AM

Tgl Cetak : 06/07/24 12:30 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	126,668,000	146,249,350	(19,581,350)	(13.389)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(126,668,000)	(146,249,350)	19,581,350	(13.389)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(126,668,000)	(146,249,350)	19,581,350	(13.389)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(126,668,000)	(146,249,350)	19,581,350	(13.389)

Keterangan :

null
null
null

Serang, 6 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001